

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN  
USAHA KECIL DI OBJEK DAN DAERAH TUJUAN  
WISATA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN  
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

*Penelitian Mandiri / Individual*

Oleh:  
*Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.*

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
BANDUNG  
2003**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN  
USAHA KECIL DI OBJEK DAN DAERAH TUJUAN  
WISATA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN  
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

*Penelitian Mandiri / Individual*

Oleh:  
*Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.*

PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
BANDUNG  
2003

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan karunia-Nya kepada peneliti, maka peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menumbuhkan dan Meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*”. Laporan hasil penelitian ini disusun oleh peneliti sebagai hasil penelitian yang dilaksanakan selama hampir satu tahun.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mewujudkan daerah otonom memerlukan peran aktif masyarakat setempat dalam setiap langkah pembangunan. Peningkatan peran aktif masyarakat dapat dilakukan dengan mendayagunakan mekanisme perencanaan dari bawah, antara lain di tingkat desa melalui wadah kelompok masyarakat desa. Tantangan saat ini adalah mewujudkan ekonomi rakyat yang kokoh meskipun menghadapi krisis kebijaksanaan, dan yang perlu dikembangkan adalah yang bertujuan melindungi, memihak dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan. Pelimpahan tugas ini akan menuntut peran aktif dan proaktif daerah untuk menangkap berbagai peluang pasar pariwisata di daerahnya, dan secara profesional merancang rencana pemasaran khususnya daerahnya masing-masing yang akan mendukung tercapainya tujuan di segala bidang. Provinsi Jawa Barat memiliki

kekayaan yang sangat potensial sehingga perlu untuk dikembangkan. Melimpahnya sumber kekayaan ini memberikan peluang untuk dieksplorasi secara maksimal, terutama untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Tak disangsih lagi sektor ini memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Dalam kaitan inilah eksplorasi kekayaan pariwisata mampu menjadi penunjang bagi pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan rakyat.

Peneliti sadar bahwa laporan hasil penelitian ini belum sempurna sesuai dengan harapan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini kami ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu peneliti sampai selesainya proses penelitian ini. Akhir kata, peneliti mengharap mudah-mudahan amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada peneliti akan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Bandung, Nopember 2003

Sedarmayanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Maksud dan Tujuan Penelitian	12
C. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pemberdayaan Masyarakat	29
1. Arti dan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat	29
2. Strategi Dasar Pemberdayaan Masyarakat	35
3. Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	36
4. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	38
B. Ekonomi Kerakyatan	40
C. Usaha Kecil	45
1. Peran Usaha Kecil	45
2. Peta Usaha Kecil	47

	3. Pengembangan Potensi Secara Berkelompok	49
D.	Pengembangan Usaha Kecil	50
	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga	50
	2. Program Penguatan Ekonomi Pedesaan	52
	3. Tantangan Usaha Kecil	54
E.	Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan	57
F.	Memacu Investasi Swasta dan Memperluas Kesempatan Kerja	59
G.	Upaya memberdayakan masyarakat	61
	1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Kebijakan Ekonomi Baru	61
	2. Cinta Produk Usaha Kecil	63
	3. Membantu dan Meningkatkan Usaha Kecil	71
H.	Mencari Strategi Pemberdayaan yang Tepat	74
I.	Kemitraan Usaha	79
J.	Prospek Pengembangan Pariwisata Berbasis Kebudayaan yang Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan	83
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	87
A.	Metode Penelitian	87
B.	Teknik Pengumpulan Data	91
C.	Instrumen Penelitian	92
D.	Pemilihan Sampel Penelitian	93

	E. Lokasi dan Lama Penelitian	93
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>95</b>
	A. Deskripsi Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang	95
	1. Kondisi Geografis	95
	2. Kondisi Kependudukan	96
	B. Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100
	C. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Lembang	111
	D. Hasil Wawancara	118
	E. Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah	122
	F. Pola Kemitraan Usaha	126
	G. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	139
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>144</b>
	A. Kesimpulan	144
	B. Saran	146
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>150</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>154</b>

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Hierarkis dan Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah di Bidang Pariwisata	15
Gambar 1.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Citra Suatu Daerah Tujuan Wisata	26
Gambar 2.1.	Matriks Struktur Ekonomi Indonesia	54
Gambar 4.1.	Pengembangan Pariwisata Berbasis Usaha Kecil	141

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil (UK)	76
Tabel 3.1.	Tabel Jadwal Penelitian	94
Tabel 4.1.	Rincian Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Wilayah Kecamatan Lembang Tahun 2002	96
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Tiap Tiap Desa Wilayah Kecamatan Lembang sampai dengan akhir Maret Tahun 2002	97
Tabel 4.3.	Letak Geografis, Keadaan Iklim, Tanah, Hidrologi, dan Potensi Pariwisata	98
Tabel 4.4.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung	110
Tabel 4.5.	Daftar Nama Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Lembang	113
Tabel 4.6.	Daftar Nama Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Lembang yang Menerima Dana Bantuan Tahun 2003	116
Tabel 4.7.	Daftar Nama Koperasi di Kecamatan Lembang	117



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Gambaran mengenai masa depan industri kepariwisataan dunia yang selama ini sering disebut sebagai industri perjalanan (travel industry) dinyatakan oleh World Tourism Organisation (WTO) sebagai salah satu organisasi pariwisata dunia, memiliki prospek yang sangat cerah. Bahkan diprediksikan pariwisata dunia akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,2% per tahunnya selama 10 tahun kedepan (2000 – 2010). Dan salah satu kawasan yang akan mengalami tingkat pertumbuhan terbesar adalah negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Optimisme yang sama disampaikan oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) yang menyatakan: disadari atau tidak, kepariwisataan dunia telah menjelma sebagai sebuah “mega industri”, dan diperkirakan akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21. WTTC bahkan telah memprediksikan industri pariwisata akan menggerakkan mobilitas wisatawan internasional hingga 850 juta wisatawan di seluruh dunia pada tahun 2005.

Secara nasional kinerja pariwisata yang biasa disebut sebagai sub sektor pariwisata – selama kurun waktu 10 tahun terakhir sebenarnya menunjukkan kinerja yang terus meningkat (apabila menggunakan parameter perkembangan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 1989 hingga 1997). Namun perkembangan negatif terjadi manakala krisis ekonomi dan politik melanda tanah air, ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisman mulai tahun 1998 hingga tahun 2000.

Dalam kelanjutannya tidak saja jumlah kunjungan yang menurun namun citra Indonesia sebagai daerah tujuan wisata juga menurun drastis di mata wisatawan internasional, terutama setelah kejadian peledakan bom Bali. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan serangkaian program penyelamatan (rescue programme), dengan arah pada perbaikan citra dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Salah satu implementasi dari program tersebut adalah penyusunan rencana pemasaran yang terarah dan ter integrasi oleh pemerintah pusat.

Disamping itu, berkaitan dengan program pemantapan otonomi dan desentralisasi, maka Ketetapan MPR nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengutarakan bahwa untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada jajaran birokrasi pemerintah daerah beserta segenap masyarakat lokal guna mengembangkan dan mengelola potensi dan peluang yang ada di daerah dalam kegiatan

ekonomi, dan memajukan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah.

Operasionalisasi Ketetapan MPR tersebut terdapat dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perangkat perundang-undangan tersebut memberikan arah serta ruang gerak pelaksanaan reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini dan memberikan petunjuk kepada perubahan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya ke setiap daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil dan proporsional.

Berdasarkan arah pembangunan di era reformasi, inti pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan pusat dan daerah ini diperlukan untuk menunjang kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing tingkat pemerintahan yang memerlukan sumber pembiayaan. Untuk mendapatkan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan, yang pertama perlu dilihat adalah tujuan ekonomi dan politik yang ada.

Tujuan ekonomi dari sistem keuangan pusat-daerah adalah: pertama, terciptanya stabilitas makro ekonomi; dan kedua, tercapainya efisiensi kinerja perekonomian. Dengan adanya otonomi, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia dari

daerah itu sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Sedangkan tujuan politik ekonomi adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih transparan dan adil, tidak ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan sehingga rasa persatuan dan kesatuan akan meningkat serta dengan berkurangnya kesenjangan kaya miskin serta meningkatnya kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II tidak hanya merupakan proses administrasi, tetapi juga suatu proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, oleh daerah, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Pelaksanaan pembangunan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan seluruh aparat pemerintah di daerah dan penyiapan masyarakat. Secara ringkas, pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu memperhatikan unsur-unsur penting, yaitu:

1. Kemantapan kelembagaan
2. Ketersediaannya sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah
3. Potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mewujudkan daerah otonom memerlukan peran aktif

masyarakat setempat dalam setiap langkah pembangunan. Peningkatan peran masyarakat dapat dilakukan dengan mendayagunakan mekanisme perencanaan dari bawah dimana di tingkat desa melalui wadah kelompok masyarakat desa. Tantangan saat ini adalah mewujudkan ekonomi rakyat yang kokoh meskipun menghadapi krisis. Kebijaksanaan yang perlu dikembangkan adalah yang bertujuan melindungi, memihak, dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi rakyat.

Namun demikian sejalan dengan berlakunya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan di Daerah, maka peran pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional akan berkurang dengan membagi tugas dan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Salah satu tugas penting yang akan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah perencanaan pemasaran pariwisata khusus untuk masing-masing daerah di Indonesia.

Perlimpahan tugas ini akan menuntut peran aktif dan proaktif daerah untuk menangkap berbagai peluang pasar pariwisata di daerahnya, dan secara profesional merancang rencana pemasaran khusus daerahnya masing-masing yang akan mendukung Indonesia sebagai *Multi Destination Country*.

Otonomi daerah, selain merupakan rahmat dan menumbuhkan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensinya masing-masing, dan mengelola manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tersebut, juga

menimbulkan tantangan yang tidak kecil. Hal tersebut terkait dengan perkembangan kepariwisataan di daerah, yang memadai dan profesional. Hal ini mutlak sebagai modal dasar untuk menggali, memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan di masing-masing daerah di Indonesia.

Perangkat tersebut mulai dari sistem, sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan serta pedoman pengembangan yang seluruhnya akan mendukung pencapaian visi dan misi pariwisata di daerah, yang secara otomatis akan mendukung visi dan misi pariwisata nasional.

Sesuai dengan wewenang dan tugasnya di bidang pariwisata, sebagai termaktub dalam peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka daerah otonom (Kabupaten/Kota) memiliki tugas di bidang pariwisata.

Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan yang amat potensial sehingga perlu untuk dikembangkan. Melimpahnya sumber kekayaan ini memberikan peluang untuk dieksplorasi secara maksimal, terutama untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Tak disangka lagi sektor ini memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Dalam kaitan inilah eksplorasi kekayaan pariwisata mampu menjadi penunjang bagi pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional dengan paradigma baru Indonesia dimasa depan yang salah satunya diwujudkan dalam visi, misi

serta strategi pembangunan yang termuat dalam GBHN tahun 1999 – 2004 yaitu sebagai berikut:

... Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis sumber alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, berkelanjutan.

Kemudian lebih lanjut dikatakan dalam GBHN tahun 1999 – 2004 tersebut tentang arah kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi kedepan oleh pemerintah adalah:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan penumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadila, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan pembangunan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan disetiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata industri kecil dan kerajinan rakyat.

3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan Undang-Undang.
5. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Memperhatikan pernyataan tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan usaha kerakyatan dalam hal ini Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat

sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ini diarahkan pada pembentukan struktur peningkatan di berbagai aspek yang satu sama lain saling ketergantungan, seperti: peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja serta diharapkan mampu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, maupun jasa.

Diterapkannya program pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ini yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mampu memberdayakan ekonomi rakyat secara maksimal. Itulah sebabnya, dalam kaitan ini pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi mediator bagi pengembangan sektor pariwisata khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, untuk memediasikan aliansi strategis antara pengusaha skala kecil, menengah di bidang pariwisata, para pengolahan hasil dalam skala tradisional, maupun swasta nasional dan pemerintah sendiri. Dengan pola ini diharapkan ekonomi rakyat akan semakin mudah diberdayakan untuk menghadapi persaingan global dunia.

Pentingnya pembinaan ini juga didukung oleh pendapat para ahli tentang pembinaan diantaranya adalah pendapat yang dikemukakan Hutaaruk, (1993: 79) yaitu sebagai berikut:

Pembinaan artinya merubah tingkat kemampuan dalam mencapai tujuan, baik secara kualitas maupun kuantitas

sehingga dapat memiliki sumber manajemen yang bersifat khusus dan memiliki ciri tersendiri sebagai sarana dalam mencapai tujuan organisasi.

Memperhatikan uraian pendapat mengenai pembinaan tersebut diperoleh gambaran bahwa yang dimaksud pembinaan adalah usaha untuk merubah kemampuan diri manusia atau pelaku kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan merupakan suatu usaha yang mengarah kepada terwujudnya suatu hasil yang dapat menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dengan mendasarkan kepada pembinaan itu sendiri, yang tidak lain adalah merupakan suatu proses kepada usaha yang dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat dirasakan hasilnya.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan atau pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Objek dan Daerah Tujuan Wisata, mengarah kepada yang orientasinya menuju suatu keberhasilan untuk mencapai hasil produksi yang dapat meningkatkan usaha sehingga dapat memenuhi pencapaian produksi yang lebih baik dengan dilakukan berdasarkan perencanaan dan proses kepada pembentukan diri masing-masing pelaku usaha tersebut.

Pada kenyataannya, pemberdayaan masyarakat masih agak sulit untuk diupayakan secara optimal, dan keberadaan usaha kecil masih banyak menghadapi permasalahan, sehingga menghambat dalam menumbuhkan dan meningkatkan usaha

kecil, terutama di objek dan daerah tujuan wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pengamatan sementara, cukup banyak permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil di objek dan daerah tujuan wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur sebagai pembina, dan sedikitnya jumlah pembina usaha kecil, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang akan dibina.
2. Belum terorganisirnya dengan baik tata cara pembinaan, termasuk didalamnya materi dan metode pembinaan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dapat berlangsung secara optimal.
3. Terbatasnya dan masih sederhananya sarana dan parasarana (termasuk peralatan) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, dan yang dipakai oleh usaha kecil, sehingga tujuan pembinaan tidak dapat dicapai secara optimal, sehingga kualitas hasil produksi juga sulit untuk ditingkatkan.
4. Terbatas dan sulitnya memperoleh dana, baik dana untuk keperluan pembinaan usaha kecil, maupun dana pinjaman untuk operasional usaha kecil, sehingga pemberdayaan

masyarakat dalam rangka pertumbuhan dan peningkatan usaha kecil sulit untuk dipercepat.

Berdasarkan kenyataan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mandiri dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menumbuhkan dan Meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat".

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **Maksud Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menelaah dan merekomendasikan cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam upaya memberdayakan masyarakat guna menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan

Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

3. Upaya pemecahan masalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

### C. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian:

1. Guna ilmiah dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam kajian ekonomi kerakyatan.
2. Guna praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

### D. KERANGKA PEMIKIRAN

Kaitannya dengan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pariwisata di era otonomi, maka sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bidang pariwisata perlu diperhatikan sebelum lebih jauh melakukan perencanaan terhadap berbagai bidang pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, secara garis besar pembagian kewenangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Kewenangan Pemerintah Pusat**

1. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
2. Penetapan pedoman kerjasama internasional di bidang kepariwisataan.
3. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah**

Kaitannya dengan promosi pariwisata, secara hierarkis hubungan dan pembagian kewenangan serta tugas bidang kepariwisataan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:

## Gambar 1.1. Hierarkis dan Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah di bidang Pariwisata



Sumber : *Deputi Bidang Pemasaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Panduan Rencana Pemasaran Pariwisata Daerah), 2002*

### 1. Pembangunan Masyarakat

#### a. Pembangunan Lokal

Pembangunan lokal mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan

maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.

Pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat paling bawah (*grassroot*) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yakni mengembangkan kemampuan masyarakat dapat berfungsi secara interaktif. Tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara kerja sama atas dasar atau prinsip swakarya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratif sebagai tujuan pokoknya.

Struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat adalah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya masyarakat diikat oleh tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan oleh pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar.

Secara umum, masyarakat terdiri atas penduduk yang pendidikannya relatif rendah dan kurang memiliki pemahaman

terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Juga kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan. Masyarakat yang demikian juga kurang mengenal prosedur atau proses yang demokratif dalam memecahkan permasalahannya. Mereka juga tipikal masyarakat yang relatif tertutup, dan mengarah pada isolasi diri.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha menciptakan dan mengembangkan partisipasi yang yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumusan kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi strateginya adalah mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pembangunan ialah merupakan tujuan utama proses perubahan. Bila masyarakat dengan penuh kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif, berarti tanda perubahan pun sudah tercapai.

## b. Kekuatan Masyarakat

### 1) Kekuatan Pendorong

Kekuatan pendorong yang ada dalam suatu masyarakat dapat membantu berlangsungnya proses perubahan, bahkan, proses perubahan tersebut dapat menjadi lebih cepat. Tanpa ada

kekuatan pendorong, seseorang, kelompok, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat bergerak untuk melakukan perubahan. Karena itu, kekuatan pendorong harus ada atau diciptakan terlebih dahulu pada awal proses perubahan dan kehadirannya harus dipertahankan selama proses perubahan berlangsung. Kekuatan pendorong dalam sistem sasaran perubahan dapat ditemukan dalam kehidupan orang yang mempunyai ciri berikut:

- a) Merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi.
- b) Rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan.
- c) Menyadari adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan.

## 2) Kekuatan Bertahan

Kekuatan bertahan di masyarakat berdasarkan tujuan untuk mempertahankan segala sesuatu yang ada didalam kehidupan masyarakat. Biasanya, kekuatan ini dicerminkan oleh rasa menentang setiap inovasi baru atau mungkin terbatas pada inovasi tertentu yang diduga akan menimbulkan perubahan terhadap sesuatu yang selama ini telah dimiliki dan dipertahankan.

Sikap bertahan dapat bersumber dari perasaan takut mengalami kegagalan, ketidaktahuan terhadap inovasi yang bersangkutan, apatis, keinginan mempertahankan tradisi tertentu, atau sumber daya untuk mengadakan perubahan yang terbatas. Sumber daya tersebut dapat mencakup aspek fisik atau perilaku, misalnya: kurang pengetahuan dan keterampilan untuk menerima dan melaksanakan inovasi baru yang bersangkutan. Juga, disebabkan oleh perilaku atau sikap negatif terhadap inovasi dan pembawa inovasi. Dalam kaitan ini, sikap pemakaian kehendak hanyalah cara yang dapat memperburuk suasana.

Karena itu, cara yang tepat dan harus menjadi alternatif utama dalam mengembangkan masyarakat yang kondisinya demikian adalah model pendekatan perencanaan sosial. Untuk mengatasi rasa antipati terhadap inovasi, penyebaran inovasi tersebut sebaiknya diganti dengan inovasi lain yang masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Intinya, inovasi yang baru ini tetap mengarahkan masyarakat kepada inovasi awal yang akan diperkenalkannya.

### 3) Kekuatan Penghambat

Kekuatan penghambat dapat ditemukan pada setiap sendi kehidupan masyarakat. Secara umum, pengganggu tersebut dapat menghambat kecepatan penyebaran inovasi yang sesungguhnya bertujuan mengadakan perubahan tertentu di masyarakat. Untuk

kondisi masyarakat demikian, model pendekatan *social action* yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat Indonesia dapat menjadi alternatif utama dalam pengembangan masyarakat. Dengan demikian kekuatan penggangu dapat segera menyadari kekeliruannya untuk kemudian beralih dan turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Dalam situasi kemasyarakatan, asumsi dasar yang mempengaruhi metode pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi.
- b) Masyarakat menginginkan perubahan dan dapat diubah.
- c) Setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam upaya meniadakan, menyesuaikan, dan megendalikan perubahan utama yang terjadi di masyarakat.
- d) Perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dan dikembangkan dari dalam akan mempunyai arti dan lebih mantap dibandingkan dengan perubahan yang dipaksakan dari luar.
- e) Pendekatan holistik dapat mengatasi masalah yang ada dengan berhasil yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan fragmentaris terpecah-pecah.
- f) Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dan tindakan bersama dalam urusan kemasyarakatan. Masyarakat

membutuhkan bantuan dan pengorganisasian usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, sama halnya dengan perorangan yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah pribadinya.

Pembangunan masyarakat dipandang sangat penting berdasarkan pertimbangan berikut:

- a) Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- b) Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
- c) Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.
- d) Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis. (Hikmat, 2001 : 83).

Berlandaskan pada nilai-nilai pekerjaan sosial, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dapat dikatakan bahwa betapa nilai-nilai tersebut jarang dipertimbangkan dalam pembangunan masyarakat modern. Karena itu, perlu ada usaha yang serius dan kontinuitas untuk menentukan asumsi tertentu yang timbul sebagai hasil analisis dari nilai-nilai sendiri dan masalah yang muncul dalam masyarakat. Asumsi tersebut akan menentukan hakikat

pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, metoda yang digunakan dan prinsip yang diterapkan dalam proses.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Mendatang

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi sangat penting sebagai *input* untuk melakukan reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Melalui reformulasi ini, peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama (subyek) dalam pembangunan. Ini membutuhkan kajian strategis yang lebih intensif tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat makro,

mezzo, dan makro. Melalui kajian ini, masyarakat lokal dapat mengembangkan potensinya tanpa ada hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten/kota dan provinsi; sedangkan struktur makro berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah (*top-down*) dari pada dari bawah ke atas (*down-top*).

Sebenarnya masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber daya alam yang ada maupun dari sumber sosial budaya. Masyarakat memiliki “kekuatan” yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada di masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Didalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang paling penting adalah bagaimana mendukung masyarakat pada posisi pelaku (subyek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok adalah memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat.

Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya. Mereka juga dilatih

untuk dapat merumuskan rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah berinti “dari, oleh dan untuk” masyarakat.

- a. Perumusan konsep,
- b. Penyusunan model,
- c. Proses perencanaan,
- d. Pelaksanaan gerakan pemberdayaan,
- e. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan,
- f. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan (Hikmat, 2001 : 232).

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan harus selalu didorong dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan normal, kepercayaan dan cinta-cita bersama. Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan dalam semua aspek dan tingkatan. Komitmen moral dan sosial dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan mencakup:

Dikaitkan dengan citra daerah tujuan wisata (*tourism destination image*), sebagian orang menyatakan bahwa citra adalah kesan atau pengaruh dari apa yang dilihatnya, namun

secara umum citra dapat diterjemahkan sebagai : “suatu pemahaman pribadi, internal dan konseptual tentang apa yang diketahui”.

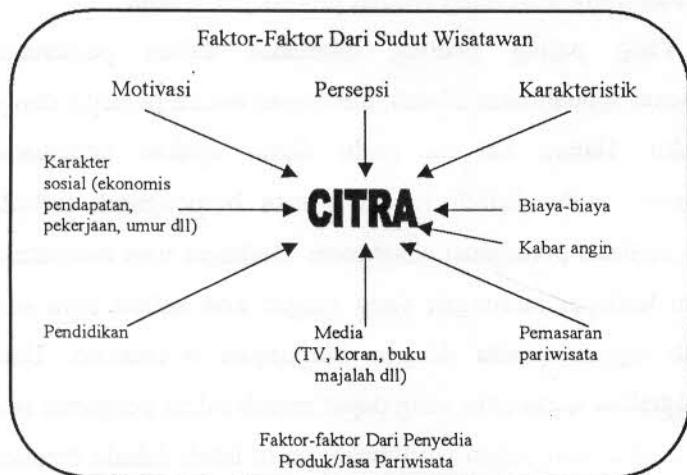
Sementara citra produk sendiri adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari produk yang bersangkutan, termasuk didalamnya kualitas, fungsi harga desain dan nilainya. Daerah tujuan wisata adalah salah satu produk yang paling kompleks serta terbentuk dari berbagai faktor seperti: iklim, infrastruktur dan berbagai atribut alam maupun budaya. Dalam hal ini suatu daerah tujuan wisata sangat memerlukan citra untuk dapat dijual/dipasarkan sebagai sebuah produk pariwisata.

Yang paling penting diketahui dalam pemahaman mengenai sebuah citra adalah, hubungan antara persepsi dengan perilaku. Dalam hal ini perlu digali apakah pemahaman mengenai suatu daerah tujuan wisata berpengaruh terhadap suatu perilaku perjalanan wisatawan. Berbagai riset menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara citra suatu daerah tujuan wisata dengan kunjungan wisatawan. Untuk menciptakan suatu citra yang dapat memberikan pengaruh besar pada tingkat kunjungan wisatawan, perlu lebih dahulu dipahami tentang bagaimana citra tersebut terbentuk. Salah satu pengaruh besar dalam pembentukan citra adalah pengalaman (*experience*) langsung yang dialami oleh wisatawan sebagai seorang konsumen. Dengan melakukan kontak langsung dengan daerah tujuan yang dikunjungi, maka seorang wisatawan terbentuk

pikiran dan pemahaman serta kepercayaannya terhadap daerah tujuan wisata tersebut.

Sementara proses terbentuknya citra itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari lingkungan wisatawan sendiri, maupun dari pengaruh yang diberikan oleh penyedia produk/jasa pariwisata. Berbagai faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.2.  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Citra  
Suatu Daerah Tujuan Wisata**



*Sumber: Tourism Destinations Image, Risk Keyser, 1993*

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap perlu mengadakan penelitian dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menumbuhkan dan Meningkatkan Usaha

Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan
- BAB II : Berupa tinjauan pustaka yang mengutarakan tentang pemberdayaan masyarakat, ekonomi, kerakyatan, usaha kecil, pengembangan usaha kecil, pembangunan ekonomi rakyat di pedesaan, memacu investasi swasta dan memperluas kesempatan kerja, upaya memberdayakan masyarakat, mencari strategi pemberdayaan yang tepat, kemitraan usaha dan prospek pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
- BAB III : Metodologi penelitian terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pemilihan sampel penelitian, lokasi dan lama penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan mengutarakan tentang deskripsi Objek Daerah Tujuan Wisata

Kecamatan Lembang, pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Lembang, hasil wawancara dan pembahasan, masalah dan upaya pemecahan masalah pola kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kemitraan usaha pariwisata.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### 1. Arti dan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat kebijakan, kalangan praktisi pelaksana program atau proyek, petugas sosial, dan kelompok personal. Pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan model pembangunan yang berpusat pada rakyat yang lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*), dengan memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.

Memberikan kekuatan (*power*) akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*, sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasi dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber -sumber dan alat-alat prosedural yang melaluiinya masyarakat dapat meningkatkan

kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut Undang-undang.

Sementara itu, Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber

lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian.

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1987), praktik dan kegiatan yang berbasiskan

pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol. Simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*innerspace*), serta orang lain yang dianggap penting, serta masyarakat disekitar kita. Elaborasi dan pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan. Dan akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.

Ide yang menempatkannya lebih dari sekedar subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan tersebut. Berkaitan dengan proses pemberdayaan, terdapat dua kecenderungan, yaitu:

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittest*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

Kedua, atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan

apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sesungguhnya, antara kedua roses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Selanjutnya, kehidupan masyarakat merujuk pada sesuatu yang menyangkut kehidupan bersama (tidak menyangkut kehidupan individual). Kehidupan bersama yang paling kecil adalah keluarga, sedangkan yang lebih besar adalah komunitas. Kehidupan di atas komunitas adalah masyarakat.

Isu kegagalan akibat dominasi paradigma pembangunan ekonomi yang kurang seimbang dengan pembangunan sosial menjadi lebih transparan setelah *World Summit for Social Development* pada tahun 1995 di Kopenhagen, Denmark yang diprakarsasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi ini menampilkan tiga isu pokok untuk mengatasi kesenjangan terhadap kesejahteraan manusia secara global, regional, dan nasional, yaitu:

1. Penanganan kemiskinan.
2. Peningkatan produktivitas kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Meningkatkan integrasi sosial.

Konferensi tersebut melahirkan kesepakatan bahwa perlunya perhatian masyarakat internasional yang lebih besar pada usaha penanggulangan ketidakadilan sosial, disintegrasi

sosial, dan kemiskinan dalam sistem pembangunan sosial. Komisi *Human Resources Development* dari *Economic and Social Commision for Asia and the Pasific* (ESCAP) sejak tahun 1999 merekomendasikan pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) dalam melaksanakan agenda pembangunan sosial.

Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya yang penting. Usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleransi terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya.

Friedmann menekankan bahwa rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan, yaitu: sosial, politik, dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar produksi tertentu, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga meningkat aksesnya pada dasar produksi, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuan juga akan meningkat.

## 2. Strategi Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan berjalananya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi ini pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendeklasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Proses perubahan struktur memerlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, sekaligus pada penanaman pengertian bahwa suatu saat mereka wajib membantu yang lemah. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak hanya cukup dengan meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal, tetapi juga dengan menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah atau belum

berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, mekanisme pembentukan modal (*capital accumulation*) yang benar merupakan kunci pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang. Proses pemupukkan modal yang benar muncul dari dalam yakni: dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dinikmati masyarakat.

Secara nasional, strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat disyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.

### **3. Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok.

Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah kepada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat.

Kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.

Ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Kebijaksaaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kerangka kebijaksanaan ini juga mencakup penciptaan ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara hati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas, dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya peningkatan kemampuan minimal harus dengan memperbaiki empat akses, yaitu:

- a. Akses terhadap sumber daya.
- b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik lebih efisien.

- c. Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan perlu diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan pasar. Penyiapan produk bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting dalam proses ini. Bagian dari kebijaksanaan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin, berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberikan layanan kepada penduduk miskin. Kebijaksanaan ini dilaksanakan secara terpilih sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **4. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dengan menggunakan berbagai tolok ukur tersebut maka segenap upaya pembangunan dilaksanakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian keterkaitan antar program pemberdayaan

masyarakat mencakup keterkaitan misi, tujuan, dan pendekatan lintas sektor. Proses perubahan itu hanya dapat lestari dan berkelanjutan jika digalakkan oleh masyarakat. Aparat dan pihak luar adalah fasilitator yang melakukan campur tangan minimum jika masyarakat belum mampu melaksanakan proses tersebut.

## B. EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi kerakyatan, atau perekonomian rakyat, berkaitan dengan kegiatan para pelaku ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi yang melingkupi kegiatan ekonomi rakyat tersebut disebut sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat merupakan perekonomian kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat tersebut. Istilah ekonomi rakyat sebenarnya mempunyai pengertian ekonomi usaha kecil sebagai upaya pemihakan. Tantangan pembangunan nasional saat ini adalah “menghidupkan” ekonomi usaha kecil. Suatu proses dapat disebut pembangunan apabila proses tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, dan pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi. Setiap warga negara sebagai pelaku ekonomi selayaknya ikut berperan dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak

rasional. Artinya, yang berproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengorbanannya (proporsional).

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi. Di Indonesia, demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Demokrasi ekonomi Pancasila, yang juga merupakan sistem ekonomi kerakyatan, memiliki semangat musyawarah mufakat dan gotong royong dan mengacu pada lima prinsip, yaitu:

Pertama, prinsip visi, misi, dan strategi pembangunan yang memihak rakyat, diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan pembangunan.

Kedua, prinsip pedoman pembangunan dengan azas musyawarah dan mufakat yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pembangunan yang benar.

Ketiga, prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan dengan azas keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan nasional.

Keempat, prinsip koordinasi pembangunan dengan azas kebersamaan antar unsur yang terlibat dalam pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah.

Kelima, prinsip pelestarian pembangunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat.

Karena kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan melalui APBN, APBD, dunia usaha, dan swadaya masyarakat merupakan istrumen pembangunan yang tepat untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif sebagai bentuk demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui rangkaian prinsip tersebut, sistem ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah ke perubahan struktur masyarakat. Proses perubahan struktur diawali dari proses peningkatan produksi dan distribusi yang selanjutnya dapat membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan serta kesempatan untuk peningkatan tabungan yang digunakan untuk pembentukan modal bagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini, akhirnya akan kembali menciptakan kesempatan

kerja yang lebih luas. Proses ini harus berjalan secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud.

Tingkat adaptasi dan kemampuan masyarakat beragam, perbedaan tingkat kemakmuran kadang-kadang sulit dihindarkan. Perbedaan tingkat kemakmuran tersebut dapat melebar, sehingga tercipta jurang pemisah antara yang mampu dan yang belum mampu, antara yang masih kecil dan yang sudah besar, dan antara yang maju dan yang masih tertinggal. Perbedaan dan tingkat kemakmuran yang makin lebar ini disebut kesenjangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kesenjangan dapat menjadi pemicu keresahan sosial.

Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah.

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pemberian otonomi dan pendeklegasian wewenang dan pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Strategi pembangunan seperti tersebut perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi, dalam hubungan sosial,

ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara almiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan menghimpun modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap, terus menerus, dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

## C. USAHA KECIL

### 1. Peran Usaha Kecil

Laporan Bank Dunia (1993), yang berjudul *Industrial Policy-Shifting into High Gear*, menyimpulkan beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia.

Pertama, tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan, pada pasar yang diproteksi.

Kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rente (*rent-seeking*) ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global.

Ketiga, lemahnya hubungan antara industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien.

Keempat, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah.

Kelima, masih kakunya Badan Usaha Milik Negara sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi.

Keenam, investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik (*inward oriented*), dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi.

Dalam konstelasi semacam ini, bisa dipahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya keterkaitan industri kecil dengan industri besar. Dualisme ini muncul karena orientasi

industrialisasi berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat (Kuncoro, 1995).

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan.

Studi Kuncoro dan Abimanyu (1994) membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan.

Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga landasan. IKKRT banyak menyerap tenaga kerja. Kecenderungan banyak menyerap tenaga kerja umumnya membuat banyak IKKRT juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKKRT akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah

tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam industri pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan (Simatupang, et.al., 1994; Kuncoro, 1996).

## 2. Peta Usaha Kecil

Dalam setiap diskusi mengenai usaha kecil selalu timbul ketidaksamaan persepsi tentang siapa yang dimaksud dengan pengusaha/industri kecil. Biro Pusat Statistik memberikan klasifikasi industri berdasarkan skala penggunaan tenaga kerjanya, yaitu:

1. Industri besar bila menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang.
2. Industri sedang bila menggunakan tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang.
3. Industri kecil bila menggunakan tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang.
4. Industri rumah tangga bila menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Departemen Perdagangan lebih menitikberatkan pada aspek *permodalan*, bahwa suatu usaha disebut usaha kecil apabila permodalannya kurang dari Rp 25 juta. Departemen Perindustrian mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp 600 juta. KADIN mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang memiliki aset maksimal Rp 250 juta, tenaga kerja paling banyak

300 orang dan nilai penjualan dibawah Rp 100 juta. Departemen Koperasi dan PPK sepandapat dengan Bank Indonesia, yang menggolongkan Pengusaha Kecil (PK) berdasarkan kriteria *omset* usaha tidak lebih dari Rp 2 miliar dan *kekayaan* (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp 600 juta. Kriteria usaha kecil, menurut UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil, adalah usaha dengan *omset* kurang dari 1 miliar per tahun dan nilai *kekayaan* (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 200 juta.

Perbedaan persepsi mengenai pengusaha/industri kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan pengusaha kecil masih terkotak-kotak atau *sector oriented*, dimana masing-masing instansi pembinaan menekan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal yaitu:

1. Ketidakefektifan arah pembinaan.
2. Tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri.

Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya “persaingan” antar organisasi pembina. Bagi pengusaha kecilpun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan “obyek” binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah secara langsung.

### 3. Pengembangan Potensi Secara Berkelompok

Menurut Mubyarto (1997), upaya mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

Kedua, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan, peningkatan derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Ketiga, melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksplorasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Dengan demikian, pemberdayaan koperasi identik dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Proses pemberdayaan itu bisa dilakukan secara individual atau melalui kelompok. Dalam konteks pemberdayaan koperasi, optimalisasi sumber daya ekonomi masyarakat berada dalam kerangka pemberdayaan melalui kelompok. Pada umumnya, proses pemberdayaan koperasi dan perekonomian rakyat merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antar strata sebagai akibat polarisasi ekonomi.

## **D. PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

### **1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga**

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan kondisi keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan prakondisi keharusan untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan (formal dan non formal) dan penyuluhan, peningkatan kesehatan dan nutrisi, serta penyediaan rangsangan untuk berusaha, termasuk penyediaan akses terhadap modal kerja dan pelayanan umum lainnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang perlu diperhatikan adalah penajaman daya nalar, peningkatan keterampilan dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggungjawab, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Banyak kebijaksanaan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan, terutama melalui program pendidikan. Adanya program wajib belajar 6 tahun disertai pembangunan SD-Inpres, program pengembangan pendidikan luar sekolah dan lainnya, memperlihatkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan. Dalam bidang kesehatan, telah banyak pula

program yang dilaksanakan pemerintah yang kesemuanya bertujuan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dan keluarga. Program "keluarga sejahtera" dari BKKBN juga mempunyai tujuan yang sama. Demikian pula, yang belum lama dilakukan yakni "pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)" juga merupakan upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak sekolah, sehingga bisa menyerap materi pelajaran lebih baik.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat di pedesaan, khususnya keluarga prasejahtera. Disamping itu kegiatan ini perlu ditujukan kepada seluruh anggota keluarga. Pengetahuan dan keterampilan dapat diberikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Bagi anggota keluarga dewasa dan mereka yang masuk usia kerja, prioritas perlu diberikan pada kegiatan peningkatan keterampilan, misalnya melalui kegiatan latihan kerja dan keterampilan.

Disamping pengetahuan dan keterampilan teknis, sumber daya manusia pedesaan perlu dibekali dengan kemampuan kewirausahaan. Pengetahuan dan kemampuan berbisnis ini dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bisnis. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Sayangnya, pengamatan selama ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak dalam upaya

mengembangkan koperasi di pedesaan, pada akhirnya menyebabkan semakin tidak jelasnya misi dan tujuan akhir dari pembentukan koperasi. Kegiatan usaha bersama (koperasi) yang sehat dan dinamis hanya bisa terbentuk jika para anggotanya adalah mereka yang paham dalam berbisnis dan mampu mandiri. Istilah “sinergi” dalam usaha bersama hanya terjadi bila setiap anggota mempunyai pemahaman dan kemampuan berbisnis. Kalau mayoritas anggota koperasi tidak paham berbisnis maka yang terjadi bukan “sinergi” tetapi “pasrah” kepada pengurus dan manajer.

Disamping kebijaksanaan juga diperlukan program “keberpihakan” yang bersifat “pemberdayaan” yang langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan umumnya dan kelompok miskin khususnya. Program penanggulangan kemiskinan, yang mulai populer sejak awal tahun 90-an, merupakan langkah “keberpihakan” yang diperlukan untuk “memberdayakan” golongan miskin. Untuk tujuan ini perencanaan program dan proyek sektoral disyaratkan mengambil target lokasi wilayah yang dianggap miskin.

## **2. Program Penguatan Ekonomi Pedesaan**

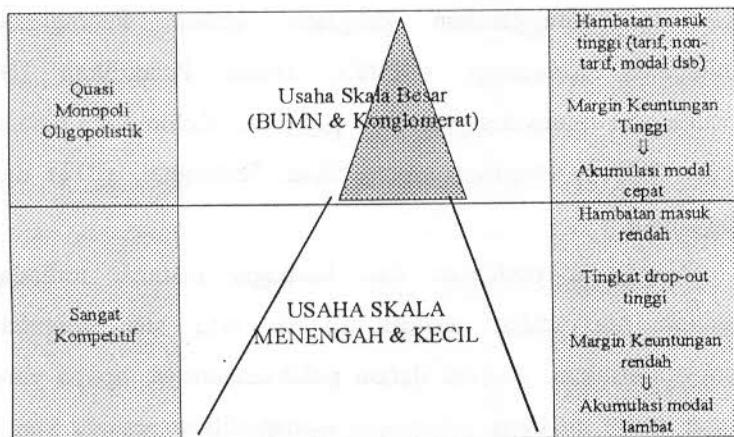
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/penguatan ekonomi rakyat pedesaan, dewasa ini ada beberapa instansi yang melaksanakan berbagai programnya di pedesaan: Bappeda menyelenggarakan program Pembangunan

Kawasan Terpadu (PKT); Kanwil Departemen Pertanian menyelenggarakan kegiatan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) dan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4); BKKBN menyelenggarakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Takesra dan Kukesra; PKK menyelenggarakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program Kelompok Belajar Usaha (KBU), Program Inpres Desa Tertinggal, (IDT) dan sebagainya.

Tingginya perhatian dari berbagai instansi terhadap kegiatan masyarakat miskin ini di satu sisi sangatlah menggembirakan. Namun dalam pelaksanaannya, upaya yang sangat mulia ini tidak selamanya menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Salah satu permasalahannya terletak pada koordinasi antar instansi tersebut. Adakalanya beberapa program diintroduksikan ke daerah yang sama, sehingga selain aspek pemerataan tidak tercapai, pada tingkat tertentu bisa juga saling meniadakan. Mengenai koordinasi ini Ginandjar Kartasasmita (1995) mengemukakan, koordinasi ternyata sering juga merupakan masalah yang mengganggu dalam upaya kita mencapai sasaran pembangunan secara optimal. Selanjutnya Ginandjar menyebutkan pula bahwa penyebab kelemahan dalam koordinasi sering kali adalah terlalu kuatnya hegemoni sektoral.

Sebagai gambaran, maka berikut ini adalah matriks struktur ekonomi Indonesia

**Gambar 2.1.**  
**Matriks Struktur Ekonomi Indonesia**



### 3. Tantangan Usaha Kecil

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan.

Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:

Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.

Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber permodalan.

Ketiga, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).

Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.

Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori:

Pertama, bagi PK dengan omset per tahun kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka umumnya asal dapat berjualan dengan aman sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu

kelancaran *cashflow* saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam KUD) amat membantu modal kerja mereka.

Kedua, bagi pengusaha kecil dengan omset antara Rp 50.000.000,00,- hingga Rp 1.000.000.000,00,- tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil jenis ini adalah:

- a. Masalah belum dipunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
- b. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
- c. Masalah penyusunan perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
- d. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.

- e. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.
- f. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti.
- g. Masalah sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

#### **E. PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT DI PEDESAAN**

Keberpihakan pada ekonomi rakyat berarti melakukan serangkaian upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yaitu menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat. Disini jelas bahwa pemihakan tidak berarti untuk memenangkan yang lemah, tetapi agar persaingan berjalan sehat dan seimbang, antara ekonomi konglomerat yang minoritas dan ekonomi rakyat yang mayoritas.

Ekonomi rakyat disini diartikan sebagai ekonomi pribumi (*people's economy is endogenous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat. Ekonomi rakyat terdefinisi sebagai perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat

pada masyarakat tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat di pedesaan. Ekonomi rakyat lebih bersifat operasional dan mikro.

Pada tataran ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi rakyat harus disinergikan dengan sistem atau kebijakan pemerintah. Sistem atau kebijakan tersebut dikategorikan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu kebijakan atau sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional, yaitu mulai dari sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan.

Program “kemitraan usaha” merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan. Dalam kondisi pasar tidak bersaing karena terdistorsi, usaha kemitraan hanya akan menguntungkan pihak (produsen) tertentu yang memiliki konsesi atau hak monopoli, sementara produsen lain akan tetap menanggung biaya inefisiensi. Konsumen golongan miskin adalah yang paling mendertia, karena harus membayar harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan dalam kondisi pasar bersaing yang lebih sehat.

Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut, peranan pemerintah dimasa mendatang perlu lebih diarahkan sebagai *regulator* dan *fasilitator*, antara lain:

1. Menyiapkan perangkat aturan-perundangan yang diperlukan,

2. Melaksanakan "penegakkan" hukum dan aturan perundangan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak,
3. Meningkatkan sarana dan prasarana umum agar mekanisme pasar bekerja secara sehat dan efisien,
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan makro ekonomi dan menciptakan iklim yang kondusif untuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta
5. Merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peranan yang tersebut terakhir, seyogyanya lebih ditujukan untuk tujuan menekan "kesenjangan" dan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara selektif, dengan target grup yang jelas dan sedapat mungkin menghindari kebijaksanaan "berpihak" yang mendistorsi pasar.

#### **F. MEMACU INVESTASI SWASTA DAN MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA**

Disamping meningkatkan sarana dan prasarana umum, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang mampu memacu investasi swasta di wilayah pedesaan. Deregulasi dalam birokrasi pelayanan dan perizinan, memangkas berbagai pungutan, merupakan bentuk insentif yang dapat meningkatkan investasi swasta. Disamping itu, diperlukan bentuk insentif lain dari pemerintah (termasuk pemerintah untuk menarik arus

investasi ke pedesaan misalnya dengan mekanisme keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu).

Dimasa mendatang, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang mampu lebih mengarahkan arus investasi tersebut ke wilayah pedesaan dan wilayah pertumbuhan baru. Langkah seperti ini termasuk langkah “keberpihakan” yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Yang sering dimasalahkan adalah kegiatan atau usaha apa yang perlu diprioritaskan pengembangannya di wilayah pedesaan. Mereka yang berlatar belakang pendidikan perhatian akan cenderung mengatakan bahwa “industri berbasis pertanian (*argo-based industry*)” yang paling tepat untuk diprioritaskan karena merupakan industri yang punya kaitan belakang (*backward*) dan ke depan (*forward*) yang lebih besar. Industri ini umumnya padat tenaga kerja, dan sekaligus menyediakan lapangan kerja yang “kompatibel” dengan kondisi sumber daya manusia masyarakat pedesaan. Masalahnya adalah cukup menarikkah usaha ini di mata para investor? Kenyataan sampai saat ini memperlihatkan bahwa usaha ini tidak menarik bagi para investor. Tingkat keuntungan yang rendah di satu pihak dan resiko yang tinggi di lain pihak merupakan dua alasan yang sering dikemukakan oleh para investor.

Dalam memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan, sulit hanya mengandalkan kegiatan berbasis pertanian saja. Yang

penting saat ini adalah bagaimana menyediakan lapangan kerja sebesar-besarnya bagi penduduk di pedesaan. Untuk itu prioritas harus diberikan kepada kegiatan usaha yang mempunyai kaitan ke depan dan kebelakang yang besar.

## G. UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

### 1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Kebijakan Ekonomi Baru

Menurut E.F. Schumacher, *small is beautiful*. John Naisbitt percaya bahwa masa depan perekonomian global berada ditangan unit usaha yang kecil, otonom, namun padat teknologi. Pendapat tersebut mendorong keyakinan kita bahwa sektor usaha kecil di Indonesia perlu diberi kesempatan berkiprah lebih luas. Oleh karena itu, paradigma ekonomi kerakyatan layak diaplikasikan dalam tataran praktis.

Di banyak negara, pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Industri otomotif di Jepang ditopang oleh unit-unit *Small and Medium Enterprises* (SMEs) sebagai pemasok suku cadang. Di Amerika Serikat, banyak produk global pada mulanya merupakan temuan kreatif para pelaku SMEs. Berdasarkan pengamatan empiris di India, Schumacher merasa yakin bahwa kelas menengah yang kuat, berjiwa entrepreneur, memberi kontribusi lebih banyak pada proses sebuah bangsa menuju tingkat kehidupan yang lebih baik.

Di Indonesia saat ini banyak orang percaya bahwa sudah waktunya paradigma ekonomi kerakyatan diaplikasikan secara serius. Tak ada lagi hak istimewa bagi sektor usaha besar yang pada gilirannya hanya akan membunuh pengusaha kecil dan menengah. Kendati paradigma ekonomi kerakyatan belum mampu menghindarkan diri dari pendefinisian yang ambigu, kita dapat memberi makna secara etimologis, yakni yang mengandung unsur “pemberdayaan”, “ekonomi” (mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi), serta “rakyat” (clemen mayoritas dalam sebuah negara). Jadi, pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya untuk membuat rakyat kuat dari segi ekonomi.

Seperti puluhan tahun kita memprioritaskan sektor usaha besar, yang terbukti hanya mendorong terciptanya *bubble economy*, sehingga kini sudah waktunya kita menjadikan perekonomian rakyat sebagai pilar pertumbuhan. Oleh karena itu, paradigma ekonomi kerakyatan terfokus pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya potensial yang dimiliki sebagian besar warga masyarakat, yang sekian lama tersembunyi di balik pusaran arus kapitalisme yang mematikan dan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh.

Era liberalisasi sudah didepan mata, bahkan datangnya akan lebih cepat dibandingkan yang kita duga semula. Agar liberalisasi ekonomi tidak menjadi sarana yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang kuat modalnya,

setiap unsur sumber daya perekonomian domestik harus dioptimalkan. Kekuatan perekonomian nasional terletak pada ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dengan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, koperasi dan usaha kecil hendaknya ikut berperan dalam menopang tegaknya daya saing perekonomian nasional dalam kancah globalisasi.

## 2. Cinta Produk Usaha Kecil

Agar unit-unit usaha kecil dan menengah mampu menempatkan krisis moneter sebagai momentum optimalisasi daya saing, terutama mereka yang berkecimpung di pasar domestik, memang dibutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membeli produk usaha kecil. Relatif murahnya harga produk usaha kecil bisa menjadi keuntungan kompetitif, namun demikian masih dibutuhkan beberapa upaya lagi, yaitu:

Pertama, pemberian bantuan dari segi produksinya. Kesadaran usaha kecil untuk berorientasi pada kualitas dapat ditumbuhkan dengan cara memberikan stimulasi, misalnya melalui pelatihan, penyuluhan lapangan dan lain-lain.

Kedua, dari segi masyarakat. Diperlukan kampanye persuasif untuk mengenalkan produk industri kecil sebagai sesuatu yang layak dibeli. Dalam situasi krisis moneter, membeli produk industri kecil memberikan banyak keuntungan, baik dari segi makro maupun mikro. Produk industri kecil yang memiliki

kandungan lokal tinggi, harganya relatif stabil dibandingkan produk dengan komponen impor yang tinggi.

Ketiga, dari strategi dan perangkat. Perangkat kebijakan maupun strategi teknis untuk mengoptimalkan penetrasi pasar. Dari aspek ini diperlukan sosialisasi produk industri kecil kepada masyarakat luas.

Dalam batas tertentu, kampanye cinta produksi dalam negeri, khususnya untuk UKM, juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Tentu dengan catatan bahwa kampanye tersebut tidak hanya mengeksploitasi sisi-sisi irasional dalam pengambilan keputusan konsumen.

Kendati banyak definisi mengenai pengusaha kecil , agaknya pengusaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam yaitu:

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus mengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain seperti: keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990, ternyata 90.6% merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7% sudah mempuayai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).

Keempat, dilihat dari golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bumbu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan perlu mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kancalah perekonomian di Kabupaten

Bandung khususnya dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Provinsi serta Nasional. Dengan kekuatan ekonomi rakyat yang merupakan pelaku ekonomi terbesar di masyarakat, diharapkan struktur perekonomian Indonesia akan solid, kokoh dan kuat dalam menghadapi permasalahan ekonomi, baik persoalan yang tumbuh di dalam maupun akibat pengaruh dari perekonomian global.

Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung di bidang ekonomi khususnya, dalam rangka pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 –2005, yaitu:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi di daerah guna membangkitkan sektor riil khususnya bagi Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi.
2. Mengembangkan sistem pembangunan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan antara lain melalui penerapan pola syariah.
3. Mendorong dan menerapkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan industri dengan pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Mengembangkan sistem perdagangan (tata niaga) di daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk sistem informasi pasar.

5. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang melibatkan masyarakat sampai di pelosok pedesaan, kegiatan ini merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi nasional.

Kegiatan Usaha Kecil Menengah meliputi kegiatan dalam berbagai sektor, mulai dari produksi dan perdagangan komoditi-komoditi seperti: makanan, pakaian, keperluan rumah tangga, cinderamata sampai pada mesin-mesin dan peralatan produksi skala kecil dan jasa (seperti: per Bengkelan, salon, penginapan, wartel, dan lain sebagainya).

Sebagian besar Usaha Kecil Menengah memasarkan produksinya di dalam negeri, namun tidak sedikit yang sudah dapat mengekspor produknya atau melakukan sub kontrak dengan usaha-usaha besar. Dalam melakukan usahanya Usaha Kecil Menengah umumnya masih menggunakan teknologi sederhana/tradisional, dikelola sendiri dan memiliki berbagai keterbatasan lain yang melekat padanya, seperti: keterbatasan modal, kurangnya informasi pasar, teknologi serta keterbatasan wawasan bisnis dan kewirausahaan.

Dalam pembinaan Usaha Kecil Menengah, secara kualitatif kondisinya hampir tidak jauh dengan koperasi, selain itu Usaha Kecil Menengah dihadapkan pada masih rendah dan

terbatasnya produktivitas, kemampuan akses dan pangsa pasar di dalam negeri apalagi di luar negeri, investasi, jaringan usaha, permodalan, kualitas sumber daya manusia, manajemen yang belum profesional.

Berdasarkan tantangan, kendala dan peluang serta faktor-faktor kunci keberhasilan, maka pembangunan koperasi dan UKM perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi daripadanya. Arah pembangunan Koperasi dan UKM pada umumnya adalah mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh, profesional dan berwawasan lingkungan, yang diikuti dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan daya saing tinggi, inovatif yang dilandasi nilai moral, etos dan disiplin kerja.

Tujuan pembangunan koperasi dan UKM pada tahun 2001-2005, adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan organisasi dan manajemen
2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan modal sendiri dan akses permodalan terhadap perbankan/lembaga keuangan lainnya.
3. Meningkatkan usaha dengan mengutamakan pemanfaatan potensi produk unggulan daerah dan memperkokoh keterkaitan dengan usaha anggota serta tetap memperhatikan keutuhan, kelangsungan dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatnya kemitraan dan jaringan usaha yang mantap.
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dilakukan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, yang menjadi pelaku dalam mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan melalui pembinaan kelembagaan, usaha, fasilitas pembiayaan dan permodalan serta perluasan pangsa pasar. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UKM berjalan seiring dengan sasaran pembangunan.

Adapun sasaran pembangunan koperasi dan UKM pada tahun 2001-2005 adalah:

Koperasi:

1. Terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan berwawasan lingkungan oleh keterkaitan usaha koperasi dengan anggotanya.
2. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas, yang secara ekonomis bekerja dengan tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi serta dapat memberikan manfaat optimal kepada anggotanya.
3. Meningkatkan akses koperasi terhadap permodalan, sumberdaya, produktivitas, pangsa pasar, informasi dan teknologi serta kemitraan.
4. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

5. Meningkatkan jumlah kelompok ekonomi produktif sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang bergabung dalam wadah koperasi.
6. Meningkatkan citra koperasi di kalangan masyarakat.

#### Usaha Kecil Menengah

1. Terwujudnya UKM yang tangguh, profesional dan berwawasan lingkungan yang memiliki etos kerja dan etika usaha yang baik.
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing Usaha Kecil Menengah, yang terlihat dari peningkatan pangsa pasar di dalam dan luar negeri.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan, sehingga semakin banyak jumlah dan peran UKM dalam perekonomian nasional.
4. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat di dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan citra UKM sebagai pelaku ekonomi masyarakat.

### **3. Menumbuhkan dan Meningkatkan Usaha Kecil**

Dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan disegala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Koperasi. Usaha Kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional

mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranan secara optimal dalam perekonomian nasional, hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat ekternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka

mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Kecil dapat dilakukan melalui:

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil.
- b. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi Usaha Menengah. Usaha Kecil yang tangguh mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya pemberdayaan Usaha Kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam

perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Usaha Kecil meliputi juga Usaha Kecil informal dan Usaha Kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Usaha Kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya,. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

## H.MENCARI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG TEPAT

Strategi pembinaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

Pertama, aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian,

meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kedua, aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portopolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).

Ketiga, mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha, baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan Hulu-hilir modal ventura, ataupun sub kontrak.

Keempat, pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluhan Industri).

Kelima, pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh lembaga yang *concern* dengan pengembangan Usaha Kecil. Hanya upaya pembinaan Usaha Kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Dalam kaitan ini, usulan Assauri (1993) untuk mengembangkan *interorganizational process* dalam pembinaan Usaha Kecil menarik untuk di simak. Dalam praktek, struktur

jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan Usaha Kecil semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis dan PKPK adalah ide dari Departemen Koperasi dan PPK, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pembangunan pengusaha kecil menjadi tanggung dan atau menjadi pengusaha menengah melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan koordinasi antar instansi.

Saat ini tercatat ada 16 PKPK di Indonesia, yang tersebar di 13 propinsi. Pada tahun 1995/1996, menurut proyeksi DEPKOP & PPK (1995), PKPK ini akan diperluas hingga terdapat di 21 Perguruan Tinggi pada 18 propinsi. Kegiatan semacam ini merupakan suatu terobosan yang tepat mengingat potensi pengusaha kecil di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Berikut ini adalah tabel lembaga pendukung pengembangan Usaha Kecil

**Tabel 2.1**  
**Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil (UK)**

Lembaga Pendukung	Peran Yang Dilakukan	Program/Investasi
<b>1. Pemerintah</b>		
1.1. Deperin	Perumusan kebijakan pengembangan, implementasi program, dan penyediaan fasilitas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan dan pelatihan</li><li>• Penelitian dan pengembangan teknologi produksi melalui R &amp; D.</li><li>• Pelayanan teknis melalui UPT</li><li>• Pelayanan informasi dan konsultasi</li><li>• Perantara UK dengan Bapak Angkat</li></ul>

1.2. Depdikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan SDM melalui semua jalur: formal, informal, dan non formal.</li> <li>Konsep link dan match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha</li> <li>Orientasi pendidikan sangat bias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program magang</li> <li>Pelatihan melalui pendidikan masyarakat</li> <li>Pembinaan kursus-kursus informal</li> <li>Perhatian terfokus pada usaha menengah, besar, formal, belum ada program yang berorientasi pada UK.</li> </ul>
1.3. Depnaker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan penempatan tenaga kerja</li> <li>Perumusan kebijakan ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan melalui BLK</li> <li>Pengembangan pusat informasi</li> <li>Penetapan UKM dan monotorignya</li> <li>Pengembangan usaha kecil dan usaha mandiri lebih ditujukan mengatasi pengangguran ketimbang pengembangan usaha itu sendiri</li> </ul>
1.4. Depsos	Pembinaan UK sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan	Pelatihan-pelatihan
1.5. Depkeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merancang kebijakan ekonomi yang kondusif bagi pengembangan UK</li> <li>Mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan yang telah diambil masih sangat minim</li> <li>Kontrol pelayanan finansial bagi usaha kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan pembinaan UK, antara lain melalui alokasi 1-5% dana keuntungan BUMN</li> <li>Penyederhanaan prosedur pelayanan finansial</li> </ul>
1.6. Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan</li> <li>Mekanisme kontrol terhadap lembaga pelaksana IDT sangat lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan desa miskin</li> <li>Inpres Desa tertinggal (IDT) dengan orientasi penggunaan dana untuk kegiatan produktif</li> </ul>
1.7. Depkop & PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan SDM</li> </ul>

	<p>pengembangan UK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsi sebagai koordinator dalam gerakan pengembangan ekonomi rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan konsultasi bekerjasama dengan perguruan tinggi</li> <li>Mengembangkan koperasi sebagai satu-satunya wadah kegiatan ekonomi rakyat</li> </ul>
1.8. Pemda bersama Bappeda & Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan perizinan usaha</li> <li>Pengaturan tata kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan fasilitas tempat usaha (sentra atau pusat perdagangan)</li> <li>Lokalisasi UK sering merugikan karena memisahkan UK dari sistem sosial yang ada</li> </ul>
2. Lembaga Swasta &	Peningkatan SDM melalui perorangan dan diktat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan SDM</li> <li>Perantara dalam pasar kerja</li> </ul>
3. LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga pelayanan alternatif bagi usaha kecil yang berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dan swasta dalam menjangkau usaha kecil</li> <li>Sangat berpotensi menjadi partner UK karena kedekatan hubungan dengan UK</li> <li>Lingkungan kerja terbatas, serta ada ketergantungan finansial dan teknisi ahli yang akan mengancam keberlanjutan lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan berbagai kelompok swadaya masyarakat pelatihan teknis produksi dan pengelolaan/ administrasi</li> <li>Penelitian dan konsultasi</li> <li>Intervensi efektif hanya dalam wilayah kerjanya</li> <li>Masih belum menjangkau kelompok usaha kecil yang betul-betul marginal</li> </ul>
4. Lembaga Pendidikan di Perguruan Tinggi	Penelitian dan pengembangan teknologi produksi, sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan skema pelayanan finansial di pedesaan</li> <li>Pelatihan dan teknis manajemen untuk pedagang kecil</li> <li>Konsultasi dan pembinaan</li> </ul>
5. Asosiasi Pengusaha Kecil	Idealnya asosiasi seperti ini terlibat langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengorganisasian pengusaha kecil harus</li> </ul>

	dalam negoisasi, perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi	dibangun dengan tujuan spesifik dan dikaitkan dengan pemberdayaan • Distribusi informasi
--	--	---

## I. KEMITRAAN USAHA

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta), usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kemitraan Usaha adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, dan saling menguntungkan.

Kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

1. Produksi dan pengolahan.
2. Pemasaran.
3. Sumber daya manusia, dan
4. Teknologi.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan.
2. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.
3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar.
4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi.
5. Memasarkan produk Usaha Kecil.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dengan:

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.

2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi Usaha Kecil.
4. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi Usaha Kecil.

Yang dimaksud dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan, yaitu:

1. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian.
2. Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko usaha.
3. Kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif.
4. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara teliti, tekun dan produktif.
5. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi dengan:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu.
2. Meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.

3. Memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidu.
4. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
5. Meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi.
6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

1. Inti-plasma.
2. Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
3. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.
4. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil

memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

5. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
6. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
7. Pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam butir 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

#### **J. PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEBUDAYAAN YANG BERPIHKAK PADA EKONOMI KERAKYATAN**

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu konsep harus melibatkan rakyat sebagai peluang langsung dari aktivitas ekonomi tersebut. Dalam suatu hasil studi yang dibuat Tim P4 Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi. Parsenibud tahun 1999, disepakati bahwa ekonomi rakyat harus memiliki ciri sebagai berikut:

1. Diselenggarakan oleh pengusaha kecil dan atau menengah.
2. Menghasilkan komoditas khas daerah baik barang maupun jasa.
3. Mampu menunjang pengembangan kepariwisataan setempat dan nasional.

Untuk memberikan jenis pekerjaan apa yang di "generate" oleh usaha pariwisata, perlu dirinci terlebih dahulu jenis usaha dari masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut;

1. Usaha jasa pariwisata terdiri dari jenis usaha:
  - a. Jasa biro perjalanan wisata.
  - b. Jasa agen perjalanan wisata.
  - c. Jasa pramuwisata.
  - d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran (MICE INDUSTRY).
  - e. Jasa impresariat.
  - f. Jasa konsultan pariwisata.
  - g. Jasa informasi pariwisata.
2. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata terdiri dari jenis usaha:
  - a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam.
  - b. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya.
  - c. Pengusaha dan daya tarik minat khusus.
3. Usaha sarana pariwisata terdiri dari:
  - a. Penyediaan akomodasi.
  - b. Penyediaan makanan dan minuman.

- c. Penyediaan angkutan wisata.
- d. Penyediaan sarana dan wisata tirta.
- e. Kawasan pariwisata.

Dari pembagian jenis usaha tersebut, teridentifikasi bahwa sektor pariwisata meng “*generate*” banyak pekerjaan informal disamping yang formal, misalnya: pada pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya ataupun minat khusus, antara lain:

1. Jasa fotografi.
2. Perajin cindera mata.
3. Pramuwisata lepas.
4. Jasa penunggang kuda, delman (andong).
5. Jasa penyewaan tikar.
6. Jasa penyewaan tenda.
7. Penyelam alam yang menyajikan atraksi mengambil “coin”.
8. Pedagang asong.
9. Penari tradisional.
10. Penata rambut dipantai, tukang pijit.
11. Pengelola pondok wisata.
12. Banyak lagi kesempatan kerja baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan “wong cilik”.

Untuk lebih jelasnya perlu dirujuk batasan tenaga kerja informal menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai berikut:

1. Bekerja perorangan atau keluarga.

2. Tidak berbadan hukum.
3. Atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.
4. Tidak memiliki hubungan formal dengan pemberi kerja.
5. Tidak mendapat gaji tetap.
6. Sewaktu-waktu dapat terputus.
7. Tidak memiliki izin usaha.

Itulah gambaran tentang siapa yang harus diangkat kepermukaan kalau paradigma baru pengembangan pariwisata yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan mau dijadikan sasaran. Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pariwisata berkelanjutan pada khususnya diharapkan dapat merangkul *stakeholder* lainnya untuk mencapai keberhasilan paradigma baru yang dicanangkan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/natural, dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Metode kualitatif meliputi sejumlah metode penelitian. "Tiap metode bertindihan dengan lainnya, namun semua mengandung ciri kualitatif dengan mengutamakan aspek tertentu" Nasution (Burgess 1985). Dalam penelitian yang dilakukan ini, aspek tertentu ditujukan pada perilaku manusia dalam organisasi, dan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.

Nasution (1988 : 9 – 11), mengutarakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi :

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting.
2. Peneliti sebagai instrumen utama.
3. Sangat deskriptif.
4. Mementingkan proses maupun produk.
5. Mencari makna.
6. Mengutamakan data langsung atau "*first hand*".
7. Triangulasi.

8. Menonjolkan rincian konstektual.
9. Subyek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti.
10. Mengutamakan perspektif emic.
11. Verifikasi.
12. Sampling yang purposif.
13. Menggunakan audit trail.
14. Partisipasi tanpa mengganggu.
15. Mengadakan analisis sejak awal penelitian.
16. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.

Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi. Penelitian tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian. Penelitian disini tidak mengutamakan angka dan statistik, walau tidak menolak data kuantitatif, tetapi yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Metode ini berusaha memahami kelakuan manusia dalam konteks yang lebih luas, dipandang dari kerangka pemikiran dan perasaan responden, dan peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur.

Triangulasi dilakukan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa

mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987:331). Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencenggan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Peneliti mengumpulkan data dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih tahu dari yang diteliti, sehingga dalam hal ini peneliti mementingkan pandangan responden.

Metode naturalistik, pada umumnya menggunakan sampel sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian, sehingga sering berupa studi kasus atau multi kasus. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah laporan penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan, serta terbuka untuk dikritik.

Untuk memperoleh situasi yang wajar, peneliti dalam melakukan observasi tidak menonjolkan diri agar tidak mengganggu kewajaran situasi. Jadi penelitian naturalistik tujuannya menemukan pola yang mungkin dapat dikembangkan menjadi teori yang didasarkan atas data dan desain penelitian baru, yang akan muncul dalam proses penelitian. Dengan memperhatikan ciri penelitian naturalistik seperti telah diuraikan tersebut, maka penulis mengimplementasikannya di dalam penelitian.

## B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Guna memperoleh data yang akurat, maka peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Metode penelitian lainnya yang terkait, adalah metode evaluasi, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara melakukan observasi, studi literatur dan dokumentasi, menggunakan instrumen dalam bentuk panduan wawancara. Ketiga teknik tersebut dipergunakan guna mendapat

data agar saling dapat melengkapi dan saling menunjang. Studi dekomentasi dimaksudkan untuk dapat mengetahui/memahami berbagai aspek yang erat kaitannya dengan berbagai masalah.

Studi literatur dan dokumentasi ini sangat penting artinya, untuk memberikan gambaran lebih jelas. Panduan wawancara telah peneliti persiapkan secara seksama dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang selengkap mungkin.

### C. INSTRUMEN PENELITIAN

Upaya peneliti adalah dalam rangka memberi gambaran tentang upaya pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil di Objek Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan evaluasi terhadap para pembina. Evaluasi dilakukan dengan disertai wawancara terstruktur, sehingga dengan demikian diharapkan akan didapatkan hasil yang seobyektif mungkin.

Evaluasi dinyatakan dalam bentuk panduan wawancara yang disampaikan kepada responden. Panduan wawancara yang berisi beberapa faktor dan terdiri dari beberapa item pertanyaan, merupakan instrumen yang penulis manfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil di Objek Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten

Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya, instrumen penelitian yang digunakan, dijabarkan dalam faktor-faktor tersebut, guna memudahkan penyusunan item-item, yang terdapat didalam instrumen. Instrumen penelitian yang berupa panduan wawancara untuk para pembina Usaha Kecil Menengah, dapat dilihat pada lampiran.

#### **D. PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN**

Sampel yang dipilih dalam rangka penelitian adalah terdiri dari pembinaan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Lembang dan Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, dengan responden pembina berjumlah 8 orang.

#### **E. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, karena lokasi ini merupakan Objek dan Daerah Tujuan Wisata yang menjadi kunjungan utama bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara termasuk masyarakat Jawa Barat. Lama penelitian kurang lebih sepuluh bulan. Jadwal penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL JADWAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEP.				OKT.				NOP.				DES.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan Penelitian:																																								
	- Penyusunan proposal	■																																							
	- Pengajuan proposal	■																																							
2	Pelaksanaan:																																								
	- Mempersiapkan alat		■																																						
	- Survey		■																																						
	- Penyebaran data			■																																					
	- Pengolahan data				■																																				
3	Penulisan hasil penelitian																																								
4	Penulisan hasil penelitian tahap akhir dan pencetakan																																								

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. DESKRIPSI OBJEK DAERAH TUJUAN WISATA KECAMATAN LEMBANG

##### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Lembang adalah salah satu dari 42 Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung. Kecamatan Laembang ini terletak di sebelah Utara dan merupakan Pusat Ibukota Pembantu Bupati Wilayah XI Lembang. Pusat atau tempat kedudukan Kantor Camat Lembang terdapat di Desa Lembang berbatasan dengan Desa Kayuambon yang dilalui jalan Kabupaten Bandung merupakan jalan menuju Objek Wisata Maribaya. Sebagian besar permukaan tanahnya merupakan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 1.247 meter dari atas permukaan laut.

- Jarak dari kantor Camat Lembang ke kantor pembantu Bupati
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara   | : | Berbatasan dengan Kabupaten Subang                           |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kota Bandung                               |
| Sebelah Barat   | : | Berbatasan dengan Kecamatan Parongpong<br>Kabupaten Bandung. |
| Sebelah Timur   | : | Berbatasan dengan Kecamatan Cimoneyan<br>Kabupaten Bandung.  |

Untuk lebih memahami keadaan Kecamatan Lembang secara garis besar, berikut ini akan dikemukakan beberapa aspek

penting dari keadaan alamnya, yaitu luas areal Kecamatan Lembang dari masing-masing desa dan menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Rincian Luas Tanah Menurut Penggunaannya**  
**Di Wilayah Kecamatan Lembang Tahun 2002**

No.	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penggunaan Tanah/Luas (Ha)						K e %
			Pertanian/ Pekarangan	Sawah	Kelana Empang	Pertanian Ladang	Kehutan an	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Lembang	320,765	179,126	-	12,00	129,639	-		
2	Pagerwangi	389,360	52,500	21,700	2,50	313,160	-		
3	Cibogo	195,342	63,000	33,000	1,00	98,342	-		
4	Cikidang	693,400	91,000	94,500	0,50	357,400	150,000		
5	Cibodas	1.273,400	50,000	63,000	1,00	222,400	937,000		
6	Cikahuripan	737,269	48,000	44,320	3,50	207,993	439,456		
7	Wangunsari	379,280	27,000	150,000	1,00	201,280	-		
8	Gudangkahuripan	454,751	117,000	49,903	2,00	284,948	-		
9	Suntenjaya	1.323,260	117,000	64,260	3,00	317,000	889,000		
10	Langensari	469,400	50,000	60,590	-	232,810	126,000		
11	Jayagiri	974,447	197,000	18,856	2,00	228,861	527,730		
12	Cikole	1.254,447	114,000	34,025	1,20	418,041	623,456		
13	Mekarwangi	802,329	9,900	34,025	-	558,404	200,000		
14	Wangunharja	604,309	58,000	82,161	1,00	463,148	-		
15	Kayuambon	180,210	25,750	4,250	-	150,210	-		
16	Sukajaya	568,031	59,000	49,930	-	211,870	247,841		
Jumlah		10.620.000	1.186,576	803,735	30,70	4.458,508	4.140,483		
%		100	11,20	7,50	0,30	42,00	39,00		

Sumber data : Laporan Tahunan Kantor Camat Lembang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa keadaan wilayah Kecamatan Lembang memiliki areal pertanian yang luas, keadaan tanah bersifat agraris dimana penduduknya kebanyakan adalah bertani.

## 2. Kondisi Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Lembang sampai dengan akhir bulan Maret 2000 tercatat sebanyak 127.203 orang, terdiri

dari 63.891 orang perempuan dan 63.312 orang laki-laki dan 33.585 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk kecamatan Lembang tiap desa dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Penduduk Tiap-Tiap Desa Di Wilayah  
Kecamatan Lembang Sampai Dengan Akhir Maret 2002**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jml KK
1	Lembang	6.684	6.690	13.374	2.671
2	Pagerwangi	3.284	3.166	6.450	1.663
3	Cibogo	3.796	3.999	7.795	1.996
4	Cikidang	2.814	2.816	5.630	1.813
5	Cibodas	3.968	3.989	7.957	2.311
6	Cikahuripan	3.751	3.590	7.341	1.986
7	Wangunsari	3.906	3.653	7.559	1.984
8	Gudangkahuripan	5.433	5.226	10.659	2.554
9	Suntenjaya	3.812	3.909	7.721	1.731
10	Langensari	3.094	3.059	6.108	2.403
11	Jayagiri	7.543	7.450	14.993	3.453
12	Cikole	3.557	3.555	7.112	2.376
13	Mekarwangi	1.949	3.026	4.975	1.016
14	Wangunharja	2.593	2.661	5.254	1.676
15	Kayuambon	3.153	3.112	6.265	1.603
16	Sukajaya	4.020	3.990	8.010	2.349
	Jumlah	63.312	63.891	127.203	33.585

*Sumber data : Laporan Kependudukan Akhir Bulan Desember 2002*

Dari jumlah penduduk tiap Desa terdapat penduduk warga negara keturunan sebanyak 243 jiwa yang terdiri dari 132 orang laki-laki dan 111 orang perempuan. Berdasarkan penggolongan penduduk menurut umur, maka penduduk di wilayah Kecamatan Lembang dapat digolongkan menjadi:

1. Penduduk usia belum produktif (0-14) sebanyak 32.748 jiwa (25,74 %)

- Penduduk usia produktif (15-54) sebanyak 73,928 jiwa (58,12 %)
- Penduduk usia tidak produktif (55 keatas) sebanyak 20.527 jiwa (16,14%).
- Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kecamatan Lembang menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 4.3.  
Letak Geografis, Keadaan Iklim, Tanah, Hidrologi, Dan  
Potensi Pariwisata**

NO	PERIHAL	LEMBANG
A.	GEOGRAFIS	
1	Letak & Jarak <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Terjauh</li> <li>Ibukota Kab.</li> <li>Ibukota Prop.</li> </ul>	14 km / 1 0,50 jam 39 km / 1,5 jam 18 km/1jam
2	Ketinggian	1.247 m
3	Temperatur	27o C – 15o C
4	Kondisi Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Desa</li> <li>Kantor Desa</li> <li>Tanah Kas Desa</li> <li>Tanah Sawah irigasi teknis</li> <li>Tanah Kering</li> <li>Tambak / Kolam Tanah</li> <li>Hutan</li> <li>Luas tanah</li> <li>Luas bangunan</li> </ul>	16 buah 16 buah 803,7 ha. 344,32 ha. 5588,9 ha 30,7 ha. 4164,4 ha. 2750 m <sup>2</sup> 2000 m <sup>2</sup>
5	Tempat Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Taman</li> <li>Goa/hutan lindung</li> <li>Tempat Pertunjukan</li> <li>Kesenian</li> </ul>	2 buah 2 buah 1 buah 3 buah

	- Rekreasi alam/ sejarah - Toko Cenderamata - Sanggar Seni - Anggota budayawan - Anggota Seniman - Penginapan	3 buah 70 buah 44 orang 2975 orang 36 buah
B	PENDUDUK	
1	Jumlah α WNI X Laki-laki X Perempuan α WNA X Laki-laki X Perempuan α Kepala Keluarga	127.228
2	Angkatan Kerja	32.111
		32.111
3	Mata Pencaharian • Petani • Peternak • Pengusaha • Pengrajin • Buruh Industri • Buruh Bangunan • Buruh Pertambangan • Buruh Perkebunan • Pedagang • Pengangkutan • PNS • ABRI • Pensiunan	18.716 8770 36 2277 1327  6336 309 2.243 1774 1054
4	Pendidikan Belum sekolah • SD • SMP • SMU • AKADEMI • PERGURUAN TINGGI	69022 16.371 42
C	PARIWISATA	
1	Hotel / Pondokan	Lihat lampiran
2	Restoran	Lihat lampiran
3	Sanggar Seni	

4	Kerajinan Rakyat	
5	Tempat Rekreasi	
	• Taman	
	• Hutan Lindung	
	• Rekreasi Alam	
	• Toko Souvenir	

Sumber data: Kantor Kecamatan Lembang

## B. PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Di Provinsi Jawa Barat, sudah lama dikenal nilai-nilai budaya (khususnya Sunda) yang berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu dapat difungsikan untuk menghadapi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Perilaku prososial yang telah lama dikenal diwujudkan dalam falsafah silih asih, silih asuh, dan silih asah. Secara harafiah, arti falsafah hidup yang sangat tinggi adalah saling mengasihi, saling mengasuh, dan saling memberikan pengetahuan diantara warga masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, kelompok maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kendatipun situasi kemiskinan menimpa sebagian penduduk pedesaan pertanian, namun mereka masih tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun dalam kondisi yang kurang memadai. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin jelas dalam berbagai adat atau kebiasaan masyarakat, pergaulan sehari-hari, dan berbentuk peribahasa.

Hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai budaya Sunda dalam kehidupan bermasyarakat (budaya *rereongan*) dapat terlihat dalam bentuk:

1. Kerjasama.
2. Musyawarah.
3. Kerukunan.
4. Gotong-royong.
5. Kesetiakawanan sosial atau tolong menolong antar anggota masyarakat.

Adanya perubahan sosial yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini mengakibatkan adanya pergeseran nilai budaya masyarakat. Perubahan ini merupakan dampak dari kemajuan ekonomi, teknologi dan informasi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang begitu tinggi dengan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, adalah merupakan Dinas teknis yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah Kabupaten Bandung.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi kelembagaan Koperasi, pembangunan Usaha Koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam, pengembangan Usaha Kecil Menengah serta melaksanakan ke tata usahaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi, pengembangan usaha Koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam, pengembangan Usaha Kecil Menengah.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketata usahaan.

Sedangkan Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengembangan Usaha Kecil Menengah yang meliputi pengembangan Usaha Kecil Menengah perdagangan dan jasa, pengembangan Usaha Kecil industri serta pengembangan kewirausahaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.
2. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.

3. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.
5. Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah.
7. Pelaksaaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan Usaha Kecil Menengah.

Berikutnya, Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Jasa.
2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Industri.
3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan usaha kecil menengah perdagangan dan jasa. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Jasa mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional kegiatan pengembangan Usaha Kecil Menengah perdagangan dan jasa.
2. Pelaksanaan pembinaan pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang perdagangan dan jasa.
3. Pelaksanaan pembinaan jaringan pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang perdagangan dan jasa.
4. Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam kemampuan akses permodalan dan pemasaran pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang perdagangan dan jasa.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan koordinasi pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang perdagangan dan jasa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Seksi Pengembangan Usaha Kecil Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan usaha kecil industri; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Usaha Kecil Industri mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional kegiatan pengembangan Usaha Kecil industri.
2. Pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang industri.
3. Pelaksanaan pembinaan jaringan pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang industri.

4. Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam kemampuan akses permodalan dan pemasaran pengembangan Usaha Kecil Menengah di bidang industri.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan koordinasi pengembangan Usaha Kecil industri dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kewirausahaan; Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional kegiatan pengembangan kewirausahaan.
2. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kewirausahaan koperasi dan usaha kecil menengah.
3. Pelaksanaan penyiapan sistem dan perangkat lunak serta penerapan teknologi tepat guna.
4. Pelaksanaan temu usaha dan promosi.
5. Pelaksanaan pengembangan lembaga asosiasi ekonomi kerakyatan.
6. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kewirausahaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

Dalam mewujudkan pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung, diarahkan pada pengembangan potensi dan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan

kepada ekonomi kerakyatan, melalui kebijakan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan dengan program pemberdayaan ekonomi pedesaan, pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta program pengembangan industri manufaktur. Berkaitan dengan ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung menetapkan Visi dan Misi.

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah: Terwujudnya koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Tangguh dalam arti bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu menjalankan kegiatan usaha dalam kondisi yang relevan secara kontinu dan berkesinambungan.
2. Profesional, bahwa Usaha Kecil Menengah memiliki sumber daya manusia dengan integritas dan loyalitas tinggi terhadap pengelolaan usahanya sehingga mampu mengembangkan usaha dan dapat membawa ketangguhan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dikelolanya.
3. Berwawasan lingkungan memiliki arti bahwa segala aktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terutama melakukan proses produksi, selalu memperhatikan akibat-akibat yang akan merusak faktor lingkungan. Sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan

alam dan lingkungan di sekitar lokasi usaha, bahkan diupayakan dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, keutuhan dengan memulihkan keseimbangan alam, maka potensi alam dapat terus dijaga untuk melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam tahun anggaran 2002, Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi 80 orang UKM
2. Penguatan Permodalan UKM melalui pola bantuan dana bergulir bagi 130 UKM.
3. Seminar Kewirausahaan yang diikuti 200 UKM.
4. Sosialisasi pengembangan dan pemantapan kemitraan UKM dengan BUMN/S yang diikuti 200 Pengusaha Kecil.
5. Pelayanan memberikan dukungan terhadap UKM-UKM yang meminjam bantuan modal kepada BUMS/S.
6. Melaksanakan/memfasilitasi UKM untuk bermitra dengan BUMN/S, sebanyak 130 dengan nilai sebesar Rp 1.115.500.000,- (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah sehingga terdapat peningkatan yaitu 80 pengusaha kecil menjadi pengusaha kecil tangguh, 15 pengusaha kecil tangguh

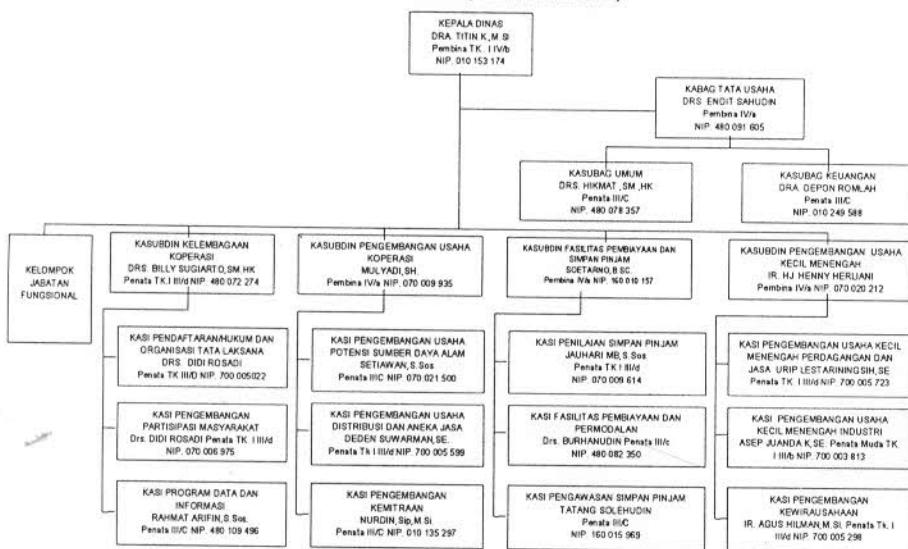
menjadi pengusaha kecil mandiri dan 5 pengusaha kecil mandiri menjadi calon pengusaha menengah.

8. Melaksanakan promosi dagang/pameran produk KUKM yang diikuti oleh dua buah koperasi dan 3 pengusaha kecil.
9. Melaksanakan pemantauan terhadap Usaha Kecil dan Menengah penerima bantuan di Kabupaten Bandung.

Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini adalah struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2002.



**Tabel 4.4.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN BANDUNG (Perda Nomor 9 Tahun 2002)**



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2003

## **C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN LEMBANG**

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 21 Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat mencakup 27 bidang, diantaranya adalah :

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tugasnya meliputi:

1. Rekomendasi untuk pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan pembagian dan ijin usaha simpan pinjam serta pembukuan Koperasi.
2. Pendataan dan fasilitas pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan sesuai Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 41 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah kabupaten Bandung ditetapkan bahwa yang dimaksud kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.

Terdapat 7 Seksi dalam kecamatan, yaitu:

1. Perencanaan.
2. Pemerintahan.
3. Pengendalian ketentraman dan ketertiban.
4. Pemeliharaan sarana umum.

5. Pemberdayaan masyarakat.
6. Pengembangan potensi pendapatan daerah.
7. Informasi dan kehumasan.

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi usaha kecil menengah, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial dengan pemerintah desa, ketahanan perangkat daerah, dan institusi lainnya.
- d. Pelaksanaan kordinasi pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berikut ini adalah daftar nama UKM Lembang, yang harus dibina, baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung maupun oleh Kecamatan Lembang dan daftar UKM Lembang yang menerima dana bantuan tahun 2003, serta daftar nama Koperasi di Kecamatan Lembang

**Tabel 4.5.  
Daftar Nama Usaha Kecil Menengah Kecamatan Lembang**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	ASSETS	OMZET	TK
1.	Ny. Awan Rahmah	Jl. Sesko AU No. 36 Ds. Lembang	Warung Nasi	8,000	21,000	3
2.	Edik Yuhanda	Jl. Cibodas Ds. Cibodas	Cabe	18,000	32,000	2
3.	Dedy Y	Jl. Cibodas Ds. Cibodas	Tomat	16,000	28,000	2
4.	Kartini	Gg. Dancer Ds. Lembang	Yoghurt	7,500	18,000	2
5.	Ujang Rohman	Kp. Cisitu Rt 4/11 Ds. Lembang	Pertanian	48,000	68,000	3
6.	Zaenal Mustofa	Jl. Tangkuban Perahu Ds. Cikole	Wayang Golek	8,000	17,000	3

7.	H. Abdul Sukanda	Jl. Raya Setiabudi Ds. Lembang	Bahan Bangunan	50,000	154,000	2
8.	CJ. Sulaeman	Jl. Raya Lembang 468 Ds. Lembang	Kelontongan	40,000	60,000	2
9.	Dana Mulyana	Kp. Dago Rt 1 / 4 Ds. Sunterjaya	Pertanian	135,000	175,000	18
10.	Eme Sukarman	Kp. Patrot Rt 1 / 6 Ds. Sunterjaya	Sapi PErah	3,575	20,880	3
11.	Toteng Junaedi	Jl. Raya Lembang 357 Ds. Lembang	Komputer	45,000	90,000	1
12.	H. Hasan Maliki	Kp. Pasirwangi Rt 1 / 2 Ds. Pagerwangi	Batako	15,000	22,000	3
13.	Anang Somantri	Kp. Sukamulya Rt 3 / 2 Ds Cibodas	Agro Bisnis	10,000	21,000	1
14.	Susi Susilawati	Kp. Lapang Rt 2 / 1 Ds. Cikole	Pertanian	34,123	55,300	2
15.	AS Heriyanto	Kom. Baru Ajak	Sayuran	8.750		3
16.	'AN'	Kom. Baru Ajak	Jasa Angkutan	61.000	63.000	2
17.	H. Sumpena Efendi	Jl. Grand Hotel 50	Pembibitan Sayur	25.000	54.000	4
18.	AS Heriyanto	Komplek Baru Ajak	Holtikultura	8.750	17.000	3
19.	Titin Sumarni	Komplek Baru Ajak	Jasa Angkutan	61.000	63.000	3
20.	Suryadi	Kp. Pajal Ds. Sukamuktipan Lembang	Jasa Angkutan	25.000	20.000	2
21.	Siti Aisyah	Ds. Jaya Giri Rt. 04 / o9 Kec. Lembang	Kasa	25.000	45.000	3
22.	Wawan Nassaco	Komp. Cijengkal Rt. 03 / 02 Ds. Wangun Sari	Perdagangan Kain	23.000	16.000	2
23.	Eulis Suryani	Komp. Cijengkal Rt 03/02 Ds. Wangunsari	Industri	23.500	35.000	5
24.	PK. Sederhana Opan Supandi	Komp. Dago Rt 02/03 Ds. Sonten Jaya Kec. Lembang	Perdagangan Sembako & W. nasi	24.000	15.000	2
25.	Juang Pratama Putra Iwan Abdu A	Pondok Buah Batu Rt. 02/09 Ds. Jayagiri Kec. Lembang	Perdagangan Umum	21.000	10.000	1
26.	PD. Rangga	Jl. Tangkuban Perahu No. 45 Lembang	Pedagangan Makanan	35.000	14.000	2
27.	PK. Firda Farm Peped Sumpena	Jl. Tangkuban Perahu No. 47 Lembang	Supplier Sayuran	35.000	15.000	2
28.	PK. Sumber Youghur Tata Permana	Jl. Gunung Putri No. 93 Lembang	Produksi Yoghurt	25.000	10.000	3
29.	PD. KS	Kp. Andir Rt 03/05 Ds. Gudang Kahuripan Lembang	Perdagangan Kelontongan	35.000	24.000	2

30.	Oman Sopandi	Kp. Dago Rt 2/3 Ds. Suntenjaya	Perdagangan	77.750	108.000	3
31.	Nesti Djubaedi Pd. Rangga	Jl. Tangkuban Perahu No. 45	Perdagangan	17.600	40.800	3
32.	Hj. Djuariah "Algijaya"	Jl Raya Tangkuban Perahu No 47	Perdagangan	29.934	145.440	2
33.	TB Jaya	Ds. Suntenjaya	Toko Besi	75.250	150.000	3
34.	Sahabatna	Kp. Dago Ds. Suntenjaya Rt. 2 / 4	Pengrajin Wajit	30.600	105.800	5
35.	Andris	Jl. Lembang Asri No. 32	Konveksi	90.750	123.000	6
36.	Salon Mawar	Kp. Dago Rt 3/3 Ds. Suntenjaya	Salon	50.000	42.000	2
37.	Dewi	Kol. Masturi No. 187	Percetakan	35.000	60.500	2
38.	Enggal	Kp. Cisitu Rt 2/11 Ds Cibodas	Warung Kelontongan	45.700	50.800	2
39.	Mekar	Kp. Batu Lonceng Rt 1/9 Ds Suntenjaya	Warung	20.500	25.500	2
40.	Sawargi	Kp. Cibeunying Rt 1 / 1 Ds Cibodas	Warung Kelontongan	15.800	18.000	1
41.	Isak Jery	Kp. Desa Cikole Rt 4 / 6	Perdagangan	12.500	17.500	2
42.	Roman Ridwan.	Kp. Desa Cikole Rt 5 / 7	Bunga Potong	15.000	20.700	2
43.	Aep Saripudin B	Kp. Cigiri Rt 4 / 7 Ds Cibodas	Ternak Sapi Perah	50.421.	34.506	3
44.	Dadang Suryono	Jl. Sersan Bajuri No. 54 Rt 4 / 6	Toko Besi	265.000	150.000	4
45.	PD. RDH Jaya					
46.	Ade Karyata	Kp. Cihideung Jl. Sersan Bajuri 95 Rt 4/6	Tanaman Hias	54.000	33.000	4
47.	Ade Kosmara	Kp. Marga Layang RT 1 / 2 Ds. Parongpong	Cabe Paprika			
48.	Pertanian Hidroponik					
49.	Warkop 1000	Jl. Kol. Masturi 188	Perdagangan Umum	50.000	72.000	2
50.	Toko MM	Jl. Kol Masturi 15	Toko	60.800	80.200	2
51.	Toko Bunga Sepatu	Jl Sersan Bajuri 159	Toko Tanaman Hias	49.200	53.200	5
52.	Toko Dwi	Jl. Kol Masturi 177	Perdagangan Umum	60.200	50.200	2
53.	Kios Roti Bakar	Jl. Kol Masturi 18	Roti Bakar	15.200	17.200	2
54.	Hegar	Kp. Kancah Rt 6 / 15 Ds Cihideung	Bunga Hias	30.500	50.200	2
55.	Tatali Wargi	Terminal Parongpong	Makanan	20.100	25,250	2

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, 2003

**Tabel 4.6.**  
**Daftar Nama Usaha Kecil dan Menengah Lembang**  
**Yang Menerima Dana Bantuan Tahun 2003**

NO	NAMA UKM	ALAMAT	JENIS USAHA	BESAR BANTUAN		BUMN PEMBERI BANTUAN	KET.
				TANGGAL REALISASI	JUMLAH (RP. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Isak Jery	Kp Cikole RT 04/06	Perdagangan	19 - 7 - 2002		PT. Perhutani	
2.	Roman Ridwan	Kp. Cikole RT. 05/07	Pertanian	13 - 8 - 2002		PT. Perhutani	
3.	Ayub Suhendar	Kp. Cikole RT. 05/07					
4.	Kartini	Jl. Pegadaian Gg. Dencer I No. 27	Susu	5 - 12 - 2002	7,000	PT. INTI	
Jumlah					7,000		

*Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, 2003*

**Tabel 4.7.**  
**Daftar Nama Koperasi Di Kecamatan Lembang**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
	KUD Karya Teguh Lembang	Jl. Maribaya No. 12 Lembang Tlp 2786209
1.	KSU Pagerwangi Lembang	Pagerwangi Lembang
2.	KPSBU Lembang	Lembang
3.	Koperasi Pasar Lembang	Lembang
4.	KPRI "Simpatti" Lembang	Jl. Kehutanan No. 1 Ds. Jayagiri Lembang
5.	Kop. Jaya Giri Lembang	Lembang
6.	KPRI BLK Cermat Lembang	Jl. Raya Lembang No. 222 Kec. Lembang
7.	KPRI Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang "Kokakrti"	Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang
8.	Kop. Peg. Kantor Balai Pertanian	Jl. Maribaya Lembang
9.	Kop. Peg. SMPN Lembang	Kec. Lembang
10.	Kop. SMAN Lembang	Kec Lembang
11.	Dolatsus	Cikole Lembang
12.	Kowad Lembang	Jl. Raya Lembang No. 145 Kec. Lembang
13.	Pusdik Ajen Lembang	Kec. Lembang
14.	Sespimpol Lembang	Jl. Raya Lembang Kec. Lembang
15.	Primkop AU Seskoau Lembang	Jl. Raya Lembang
16.	Kopkar. PT. Baruajak Lembang	Lembang
17.	Kopkarin PT. Carlo Erba	Jl. Raya Lembang
18.	Kopkar BPR Mukarohmah Lembang	Jl. Raya Panorama 32 Lembang
19.	Kopkar PT. Otto Pharmaceutical Industri	Jl. Raya Lembang Km. 12, 1 Desa Gudang
20.	K.W.P. Lembang	Kec. Lembang
21.	Koperasi Veteran Lembang	Lembang
22.	Koperasi Lembang	Lembang
23.	Kukindo "Hidroponk" Bandung Utara	Jl. Kol Masturi Parongpong
24.	Kop. Hortikultura Desa Pagerwangi "Putra Segar" Lembang	Jl. Bukanagara II/53 Pagerwangi Lembang
25.	Kop. Petani Jahe Lembang "Bina Sejahtera"	Jl. Raya Tangkuban Perahu
26.	Kop. Petani Hortikultura Manoko "Hikmah Tani Tiga"	Jl. Manoko No. 12 Ds. Kahuripan Lembang
27.	Kop. Pengusaha dan Pedagang Eceran	Jl. Raya Tangkuban Perahu No. 7 Lembang
28.	Kop. Petani Desa Sukajaya "Mitra Usaha"	Sukajaya Lembang
29.	Koptan Desa Cikidang	Jl. Terusan Pasar Ahad Selatan
30.	Koptan Desa Gudang Kahuripan	Jl. Raya Lembang No. 160
31.	Bina Usaha Tani Indonesia	Desa Kahuripan Kecamatan Lembang
32.	Koptan Desa Ciboda "Kompos"	Jl. Maribaya Timur 369 Desa Cibodas
33.	Koptan Desa Kayu Ambon "Mulya Tani"	Jl. Pasar Raya Maribaya No. 110
34.	Kowades Wangon Sari "Bina Desa"	Jl. Desa Wangon Sari No. 104
35.	Kowades Cibodas "Cibodas"	Jl. Cibeunying No. 77 Ds Cibodas
36.	Kowades Lembang "Adiguna Lestari"	Jl. Jaya Giri No. 68 Desa/Kec Lembang

37.	Kop. Warga Keluarga Besar Perintis	Jl. Raya Maribaya No. 14 Lembang
38.	Koperasi Jamaah Mesjid Bina Umat	Jl. Langensari Desa Langensari
39.	Kub Aneka Ternak "Bina Satwa"	Jl. Bukanagara I RT 03/01 Desa Pagerwangi Kec. Lembang
40.	Kub Ekofarming	Jl. Raya Lembang No. 222 Desa Lembang
41.	Kub Rekagumati	Jl. Peneropong Bintang Kp. Jalalima RT 01/07 Kec Lembang
42.	Kub Desa JayagiriLembah Harapan Jaya	Jl. Gunung Puti RT 03/10 Desa Jayagiri
43.	Kub. Desa Cikole Bumi Subur	KP. Pasar Ahad Desa Cikole Kec Lembang
44.	Kub Desa Mekarwangi	Kp Warung Caringin RT 05/08 Desa Mekarwangi Kec. Lembang
45.	Kub Lestari (KUBL)	Jl. Kolonel Masturi No. 18 RT 02/05 Desa Cikahuripan
46.	Kop. Aneka Usaha Desa Lembang	Jl. Sesko AU No. 19 Lembang
47.	Kop. Aneka Usaha dan Perdagangan Desa Pager Wangi "Amanah"	Desa Pagerwangi Kec. Lembang
48.	Kop. Aneka Usaha dan Perdagangan "Alam Tangkuban Perahu"	Jl. Tangkuban Perahu No265 Lembang
49.	Koppontren Al Mubarokah	Kp. Sukahaji RT 01/01
50.	Koppontren "Mustika Al Mussyarakat"	Jl. Maribaya No. 148 Lembang
51.	Kop. BMT Dana Ukhwah Kec. Lembang	Jl. Panorama I No. 30
52.	Kop. Pedagang Cendera Mata "Paguyuban Mandiri"	Jl. Gunung Tangkuban Perahu RT 05/01
53.	Kop. Pengumpul Hasil Bumi Desa Lembang "Bina Usaha Nusantara"	Jl. Seskoau No 8 Kec. Lembang
54.	Kop. Aneka Usaha "Bina Karya"	Jl. Kol. Masturi No 12 Cikahuripan
55.	Kowades Mekarwangi "Harapan Makmur"	Kp. Sukamenak RT. 02/08 Desa Mekarwangi
56.	Kop. Aneka Usaha "Jaya Mandiri"	Kp. Cidadap RT 04/04 Desa Cibodas Lembang
57.	Koptan Sayur mayur "Giri Mukti"	Jl. Tangkuban Perahu Km. 3 Desa Cikole
58.	Kub "Sahabat"	Jl. Grand Hotel No 35-39 Desa Kec. Lembang
59.	Kop. "Wanamitra" (KOWAMI)	Jl. Lapang No 79 Lembang
60.	Kop. Wanita Lembang	Jl. Sesko AU No 18 Lembang
61.	Kop. Karya Bersama BPPKS	Jl. Panorama Desa Kec. Lembang

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, 2003

## D. HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara secara berulang kali, baik dengan aparat Pemda Kabupaten Bandung khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, yaitu seksi Pembinaan Usaha

Kecil, maupun dengan aparat Kecamatan Lembang, yaitu Sekretaris Camat beserta personil Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan pihak lainnya maka pokok-pokok kesimpulan wawancara terstruktur dapat diutarakan sebagai berikut:

### **1. Pembina Usaha Kecil**

- a. Pada dasarnya dinyatakan bahwa jumlah pembina yang ada pada saat ini dirasakan masih kurang.
- b. Pembina cukup aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada Usaha Kecil.
- c. Kemampuan pembina dalam penyampaian materi dirasakan cukup memadai, walaupun ingin ditingkatkan secara terus menerus.
- d. Keterampilan teknis yang dimiliki pembina, walaupun dirasakan kurang memadai dalam melaksanakan pembinaan, namun upaya peningkatan selalu diupayakan dengan cara mengikuti pendidikan dan latihan, penyuluhan dan lain-lain.
- e. Pembina merasa cukup mampu dalam memberikan contoh, bahkan para pembina juga sering mengadakan studi banding ke beberapa tempat, yang mana hal tersebut dapat dijadikan pengalaman baik untuk pembangunan Usaha Kecil di masa yang akan datang.
- f. Daerah pemukiman penduduk rata-rata dinyatakan cukup cocok untuk digunakan dalam kegiatan Usaha Kecil.

- g. Daerah pemukiman penduduk dirasakan cukup mendapat pembinaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- h. Tempat yang tersedia cukup dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Usaha Kecil.

### **2. Materi Pembinaan Usaha Kecil**

- a. Pada umumnya materi pembinaan yang disampaikan sudah digunakan untuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dewasa ini.
- b. Penyampaian materi pembinaan telah diupayakan berkaitan dengan penanggulangan faktor penghambat dan kualitas hasil yang diharapkan.

### **3. Cara Pembinaan Usaha Kecil**

- a. Pembinaan telah dilakukan dengan cara membina pada kelompok kegiatan Usaha Kecil yang sejenis secara berkala ditempat tertentu, bahkan dapat ditambah frekuensi kegiatan pembinaan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan, bila perlu telah menggunakan metode percontohan atau praktik lapangan sesuai dengan tuntutan kbutuhan masing-masing Usaha Kecil.
- c. Pembinaan dilakukan dengan cara tidak/belum memberikan buku pedoman tentang kegiatan Usaha Kecil.
- d. Dalam melaksanakan pembinaan selalu diupayakan menyediakan konsumsi.

- e. Dalam melaksanakan pembinaan tidak menyediakan hanya pengganti atas waktu yang digunakan, hal ini cukup berpengaruh terhadap motivasi pembina maupun yang dibina.
  - f. Dalam melaksanakan pembinaan pada umumnya menyediakan dan menggunakan alat bantu peraga.
- 4. Pengelolaan dan Produk yang dihasilkan Usaha Kecil**
- a. Setelah mendapat pembinaan maka pengelolaan Usaha Kecil dapat mencapai peningkatan yang diharapkan.
  - b. Setelah dilakukan pembinaan, maka manajemen Usaha Kecil menunjukkan kebaikan/penyempurnaan.
  - c. Produk Usaha Kecil yang dihasilkan setelah dilakukan pembinaan, terdapat peningkatan permintaan, bahkan telah dapat melakukan pameran dan permintaan semakin meningkat.
  - d. Hasil produksi Usaha Kecil diupayakan untuk dipasarkan keluar daerah Usaha Kecil yang memproduksi, bahkan pemasaran sampai keluar negeri.
  - e. Pemasaran hasil produksi Usaha Kecil telah memperhatikan/mengutamakan kualitas hasil produksi.
  - f. Harga jual hasil produksi Usaha Kecil yang dipasarkan dapat menutup biaya produksi dan cukup menambah pendapatan dan kesejahteraan.
  - g. Kemampuan teknik dan manajemen Usaha Kecil mengalami peningkatan.

- h. Terdapat peningkatan kemampuan mengembangkan atau memperluas lapangan usaha baru.
- i. Produktivitas Usaha Kecil telah mengalami peningkatan.

## 5. Peralatan

- a. Alat produksi yang digunakan Usaha Kecil masih sederhana, namun cukup menghasilkan produk yang diharapkan.
- b. Alat produksi yang digunakan cukup tepat dan berguna.
- c. Alat produksi yang digunakan dapat meningkatkan kualitas hasil produksi Usaha Kecil dan menghemat biaya.

## 6. Dana/Modal

Secara umum dapat dikatakan bahwa dana/modal yang dimiliki oleh Usaha Kecil masih minim, sehingga masih sangat membutuhkan tambahan dana untuk biaya operasional, guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil.

## E. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

### 1. Masalah

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung, termasuk didalamnya di Kecamatan Lembang walaupun terlihat cukup berhasil ditinjau dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pendanaan maupun aspek keuangan/permodalan, namun dampak dari krisis ekonomi maupun moneter yang melanda, baik nasional maupun regional, khususnya di Kabupaten Bandung masih sangat terasa, dimana

hal ini berpengaruh terhadap pengembalian Kredit Usaha Tani, sampai posisi akhir Desember 2002 terdapat tunggakkan sebesar Rp 328.078.901.107,- (tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh rupiah).

Disamping peluang yang sangat prospektif dan kondusif, secara umum terbentang berbagai masalah yang harus mampu dihilangkan atau diatasi diantaranya:

- a. Kondisi sosial, politik, ekonomi yang belum stabil, sehingga kurang menunjang pertumbuhan/peningkatan Usaha Kecil khususnya di Objek dan Daerah Tujuan Wisata.
- b. Masih rendahnya apresiasi masyarakat termasuk sebagian besar dunia usaha terhadap Usaha Kecil yang ada sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil khususnya di Objek dan Daerah Tujuan Wisata.
- c. Kurangnya akses serta minimnya informasi tentang Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata yang ada sehingga penggalian potensi dan upaya pertumbuhan dan peningkatan menjadi sulit.
- d. Tidak jelasnya "*moral commitment*" dari kelompok pengusaha besar terhadap keberpihakan kepada kegiatan Usaha Kecil.
- e. Masih terbatasnya kemampuan manajerial termasuk kemampuan promosi para pengusaha kecil dalam mengakses pasar, sehingga masih tergantung kepada pengusaha besar, dan terkadang dalam penentuan harga produk, pengusaha kecil

berada dalam “*weak bargaining position*” atau lemahnya posisi tawar menawar.

Selain itu keberadaan Usaha Kecil secara kualitatif sarat dengan berbagai masalah. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi berbagai masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana/peralatan yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah.
- b. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia/aparatur Dinas sebagai pembina, baik dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, maupun dari Kecamatan dalam hal ini selaku pembina.
- c. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen baik pembina maupun yang dibina masih minim.
- d. Masih terbelenggu oleh perilaku produksi dan manajemen tradisional, dan kurang mengenal arti perluasan usaha.
- e. Kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku produksi dan kualitas tenaga kerja kurang memadai.
- f. Keterbatasan modal kerja usaha, mengakibatkan pertumbuhan dan peningkatan usaha kecil menjadi sangat lambat.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pembinaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan khususnya di Kecamatan.

## **2. Upaya Pemecahan Masalah**

- a. Apabila kondisi sosial, politik, ekonomi stabil maka akan menunjang percepatan pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil, khususnya di Objek dan Daerah Tujuan Wisata. Oleh sebab itu pemulihan kondisi sosial, politik, ekonomi perlu segera diupayakan.
- b. Perlu diupayakan peningkatan apresiasi masyarakat termasuk sebagian besar dunia usaha terhadap kegiatan yang menunjang Usaha Kecil, sehingga mempercepat proses pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil.
- c. Akses dan informasi tentang Usaha Kecil di Obyek dan Daerah Tujuan Wisata perlu dapat segera di sebar luaskan, agar mempercepat proses pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil.
- d. Perlu ada upaya untuk lebih dapat terbentuknya “moral commitment” dari kelompok pengusaha besar terhadap keberpihakan kepada kegiatan Usaha Kecil, agar pengusaha besar mau untuk mengadakan kemitraan usaha dengan Usaha Kecil.
- e. Perlu ada upaya peningkatan kemampuan manajerial, termasuk kemampuan promosi para pengusaha kecil dalam mengakses pasar, sehingga tidak ada ketergantungan kepada pengusaha besar.

- f. Mengajukan penambahan anggaran pada tahun berikutnya untuk menambah/pengadaan sarana dan prasarana, atau peralatan, dan kebutuhan lainnya.
- g. Mengikutsertakan aparat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pendidikan dan latihan, baik yang bersifat struktural, fungsional, maupun keterampilan, untuk menambah kemampuan/kualitas mereka.
- h. Meningkatkan intensitas pendidikan dan latihan manajemen usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pengenalan terhadap teknologi yang mendukung Usaha Kecil Menengah serta penyuluhan pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung perluasan Usaha Kecil Menengah.
- i. Penggalian dan pengembangan potensi sumber daya alam sehingga dapat mendukung tersedianya bahan baku yang berkualitas baik serta tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
- j. Mengusahakan adanya bantuan dana/modal kerja dari lembaga keuangan maupun perbankan bagi percepatan pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil Menengah.

## F. POLA KEMITRAAN USAHA

Pola kemitraan usaha di Indonesia hingga kini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi:

Pertama, pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dimana Bapak angkat (baca: usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma.

Kedua, pola dagang, dimana Bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya.

Ketiga, pola vendor, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat tidak memiliki hubungan kaitan ke depan maupun ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh Bapak angkatnya. Contoh: PT. Krakatau Steel yang *core business*-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo.

Keempat, pola subkontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh Bapak angkat. Selain itu terdapat interaksi antara anak dan Bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan atau informasi.

Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni, dan dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara “Pak Bina” dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pengabdian kepada masyarakat. Departemen Koperasi dan PPK telah merintis kerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi sejak tahun 1994/95 untuk membentuk Pusat-Pusat Konsultasi pengusaha Kecil (PKPK). Selama ini pola pembinaan lewat program ini

meliputi pelatihan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha, dan lokakarya/seminar usaha kecil.

Agaknya diperlukan reorientasi prinsip kemitraan. Jalinan kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu *saling membutuhkan dan saling membantu*. Prinsip saling membutuhkan akan menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat "alami" dan tidak atas dasar "belas kasihan". Berlandaskan prinsip ini, Usaha Besar akan selalu mengajak Usaha Kecil sebagai *partner in progress*. Pola Bapak-anak angkat banyak yang tidak didasari atas prinsip saling membutuhkan. Ini berdasarkan fakta, seringkali bidang usaha dari Bapak angkat sama sekali berbeda dan tidak ada kaitan dengan bidang usaha dari usaha kecil yang menjadi anak angkatnya. Sistem Bapak angkat ini memang diharuskan bagi BUMN dengan menyisihkan 1-5% labanya, dan bagi perusahaan swasta besar dengan cara persuasif.

Yang terjadi di lapangan adalah:

1. Pembinaan yang diberikan Bapak angkat dirasakan kurang efektif, karena Bapak angkat bagaikan sinterklas yang membagi dan pembinaan tanpa peduli dengan dinamika bisnis anak angkatnya;
2. Bapak angkatpun merasakan kemitraan yang terjalin hanyalah sekedar memenuhi misi sosial.
3. Prinsip saling membantu akan muncul apabila usaha besar memang membutuhkan kehadiran usaha kecil.

Permasalahan menahun yang dialami oleh sebagian penduduk, menyebabkan penduduk miskin, desa tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Potensi dan peluang ekonomi yang muncul sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang kaya dan mampu. Keadaan ini jika dibiarkan terus berlangsung akan menyebabkan kesenjangan.

Langkah penanggulangan kemiskinan di pedesaan dilaksanakan,

Pertama, dengan dibarengi oleh pemberdayaan dan pemihakan terhadap masyarakat miskin di pedesaan. Pemberdayaan diwujudkan dengan upaya yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat miskin di pedesaan, berupa peningkatan motivitas, keterampilan, penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Pemihakan diwujudkan oleh pemerintah dengan menciptakan iklim yang sehat dan adil bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dan bersaing secara optimal, misalnya dengan menciptakan kebijaksanaan yang bersifat melindungi, atau yang memberikan kemudahan/kelonggaran aksebilitas masyarakat desa terhadap sumber-sumber ekonomi, termasuk modal di dalamnya.

Kedua, langkah penanggulangan kemiskinan juga perlu diupayakan dengan pengendalian terhadap kelompok ‘kaya’ dan hak kepemihakan, hak pengelolaan aset produktif negara maupun

kontribusi mereka terhadap perkembangan masyarakat miskin, khususnya yang ada di pedesaan.

Langkah penanggulangan kemiskinan untuk mencapai masyarakat maju, mandiri, sejahtera dan adil, diawali dengan penyusunan kalender tahunan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Tim Pembinaan Pembangunan Daerah. Kalender tahunan harus memuat tahap perencanaan pembangunan daerah. Dalam realisasi rencana tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembagunan daerah harus mampu mencerminkan keseimbangan 20 sektor, yang pada pelaksanaannya ditajamkan pada indikator pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri perlu mengacu pada proses transformasi struktur, yang ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat. Sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan ini, akan digunakan sumber dana pemerintah dan sumber dana swasta.

Tahap perencanaan pembangunan desa meliputi:

#### 1. Perencanaan/alokasi dan pembangunan

Dibutuhkan akurasi dan ketepatan yang sangat tinggi dalam perencanaan dan alokasi ini agar dana pembangunan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Untuk itu, kriteria pemberian bantuan perlu terus disempurnakan agar makin mengarah pada masyarakat miskin yang dituju.

#### 2. Perlu penyaluran dana pembagunan oleh masyarakat

Agar dana yang telah dialokasikan dapat dan terserap secara utuh dan tepat pada waktunya, maka dibutuhkan prosedur penyaluran dana yang tepat dan sederhana. Prosedur penyaluran dana Inpres Desa perlu memperhatikan prinsip ini agar Dana Inpres Desa dapat sampai, dicairkan, dan diterima secara utuh oleh masyarakat desa.

### 3. Pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan

Pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan memanfaatkan dana Inpres Desa perlu memperhatikan penyempurnaan pada 20 sektor pembagunan. Namun demikian, mengingat terbatasnya dana Inpres Desa, dan perlu hasil yang konkret dalam memanfaatkan dana Inpres Desa, maka diupayakan penajaman prioritas yang mengacu pada indikator pembangunan pedesaan, yaitu pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pedesaan, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan, dan pemantapan system monitoring dan evaluasi (money) pembangunan pedesaan.

### 4. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pedesaan

Pengendalian pelaksanaan pembangunan pedesaan diperlukan agar pembagunan terlaksana sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembagunan yang sesuai dengan arah, tujuan dan prosedur yang ditetapkan, sehingga diharapkan hasil pembangunan pedesaan dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

## 5. Pelaporan dampak pembangunan pedesaan

Dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan dana Inpres Desa, harus mengena secara langsung maupun tidak langsung pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, dampak dari pemanfaatan Inpres Desa bagi pembangunan masyarakat pedesaan juga harus mampu dilaporkan dan dievaluasi, sehingga dapat dijadikan tolok ukur bagi pemberian dan perbaikan pembangunan tahun selanjutnya.

Indikator pembangunan pedesaan merupakan penajaman prioritas dari 20 sektor pembangunan, agar pemanfaatan dan Inpres Desa dapat dirasakan dampaknya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Ujung tombak dari prioritas yang ada adalah **pembangunan ekonomi rakyat** yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kerja dan sumbangnhan yang diberikannya pada proses pembangunan yang telah berlangsung. Terbentuknya ekonomi rakyat di pedesaan merupakan prakondisi dari terciptanya masyarakat pedesaan yang maju, mandiri, sejahtera dan adil. Perwujudan ekonomi rakyat di pedesaan membutuhkan beberapa prasyarat yaitu:

1. Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya.

Kondisi ini dicapai dengan cara peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan formal sekolah. Namun demikian juga penting untuk mengembangkan pendidikan non-formal, yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan masyarakat desa terhadap hal-hal yang terkait dengan pembangunan pedesaan dan pembangunan ekonomi rakyat.

2. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa yang mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan pedesaan

Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa diupayakan dengan cara pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan pemerintah desa, dan kewaspadaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, penguatan kelembagaan desa perlu diupayakan dengan cara melibatkan kelembagaan pedesaan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah desa.

3. Prasarana yang merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pedesaan dicapai dengan cara pembagunan, peningkatan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana. Agar prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, maka dibutuhkan identifikasi kebutuhan yang akurat. Hal ini dicapai dengan cara

memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif untuk menentukan program-program pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan desa.

#### 4. Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi (monev)

Monitoring dibutuhkan agar pelaksanaan sesuai dengan arah dan prosedur pembangunan pedesaan yang tepat. Sistem evaluasi dibutuhkan agar hasil pembangunan pedesaan dapat dinilai sehingga dapat dibenahi dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Prospek pelaksanaan pembangunan pedesaan yang diprioritaskan pada 5 indikator tersebut, harus diarahkan pada transformasi struktur, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*), yang ditujukan dari peningkatan partisipasi dan pendapatan yang diikuti oleh perkembangan ekonomi rakyat di pedesaan. Proses transformasi struktur di capai secara bertahap melalui proses sebagai berikut:

##### 1. Penciptaan lapangan pekerjaan (*employment creation*)

Pembangunan pedesaan pada awalnya harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan rakyat desa, misalnya dengan membangun industri pengolahan produk pertanian yang padat karya.

##### 2. Peningkatan pendapatan (*income generation*)

Penciptaan lapangan pekerjaan diharapkan mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

### 3. Peningkatan tabungan (saving mobilization)

Peningkatan masyarakat desa, selain digunakan untuk konsumsi juga diharapkan memberikan dampak bagi tabungan masyarakat desa.

Peningkatan tabungan masyarakat desa diharapkan pada saatnya akan berdampak pada peningkatan investasi sebagai penggerak pembangunan pedesaan.

### 4. Akumulasi modal (capital accumulation)

Peningkatan tabungan masyarakat desa diharapkan dan pada saatnya akan berdampak pada peningkatan investasi sebagai penggerak pembangunan pedesaan.

Peningkatan ekonomi akibat peningkatan investasi akan berimplikasi pada perubahan teknologi yang digunakan dalam pembangunan pedesaan. Namun demikian, peningkatan teknologi harus tetap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa. Pada akhirnya, perubahan teknologi diharapkan akan kembali memberikan dampak positif pada peningkatan lapangan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pedesaan, khususnya masalah kemiskinan, instrumen yang digunakan adalah:

#### 1. Sumber dana pemerintah

Sumber dana terbagi dua bagian, yaitu *government budget* dan *non government budget*. *Government budget* adalah sumber dana yang berasal dari APBN atau APBD, yang terdiri dari

anggaran rutin. Dana Pembangunan Sektor/DIP, dan Bantuan Pembangunan Daerah/Inpres. Anggaran rutin merupakan sumber dana bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparat pemerintah menjadi prakondisi bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain keberhasilan pemberdayaan aparat menjadi salah satu faktor penting yang ikut menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Sementara terkait dengan DIP dan Inpres, sering dengan semangat pembangunan otonomi daerah pemberdayaan masyarakat, kecenderungan pembangunan harus makin terkonsentrasi di daerah, yang tercermin dari dua hal, *pertama*, ini harus tercermin dari bergesernya dana pembangunan, dari DIP sektor menjadi Inpres, *kedua*, makin besarnya wewenang pemerintah daerah dalam menentukan keputusan-keputusan pembangunan di wilayahnya, yang antara lain ditunjukkan oleh bergesernya sifat bantuan dari *specific-block grant* menjadi *block grant*. *Non-government budget* adalah dana yang pemerintah yang sumbernya bukan termasuk bujet pemerintah. Peran pos ini dalam prakteknya sangat membantu pengembangan usaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Hal ini dapat terjadi karena dalam kenyataan, pos ini secara umum, usahanya lebih terkait dengan usaha kecil dan pedesaan. Termasuk dalam kategori ini adalah Lembaga Keuangan (Takesra, Kukesra, KUK, dan beberapa lainnya), dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank (Modal Ventura, PIR, Pegadaian, dan Dana Keuntungan BUMN).

## 2. Peran Swasta atau Masyarakat.

Pada suatu saat, sumber dana masyarakat harus mampu secara dominan membiayai pembangunan, khususnya pembangunan daerah atau desa. Hal ini mencerminkan peningkatan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dan swasta, yang merupakan salah satu hal yang dituju dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sumber dana masyarakat atau swasta ini dapat dilihat dalam bentuk seperti investasi swasta di pedesaan atau kawasan Indonesia Timur, penyisihan keuntungan pengusaha besar sebesar 2 persen untuk usaha kecil kemitraan, dan lain sebagainya.

Untuk membina proses pelaksanaan pembangunan tersebut dibentuk TIM Pembina Pembangunan Daerah. Fungsi pembinaan akan mencakup pengarahan, pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa yang makin mengutamakan peran pemerintah daerah dan masyarakat daerah di dalamnya. Tim pembinaan pembangunan daerah terdiri dari Bappenas, Depdagri, Depkeu, Departemen Teknis, dan BPS. Secara definitif tugas masing-masing instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui Deputi Bidang Regional dan Daerah serta Deputi Bidang lain yang terkait melakukan koordinasi pembinaan

perencanaan umum dan menyerasikan program pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa.

2. Departemen Dalam Negeri:

- a. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa melakukan pembinaan administrasi pengelolaan bantuan, koordinasi pelaksanaan bantuan di Desa dan penyuluhan kebijakasanaan secara nasional.
  - b. Ditjen PUOD melakukan pembinaan dan pengendalian tata laksana pengendalian daerah.
  - c. Ditjen Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan.
3. Departemen keuangan melalui Ditjen Anggaran bertanggung jawab atas pengaturan, penyediaan penyaluran dan pencairan dana pembangunan.
- ✓ 4. Departemen/Instansi Teknis yang terkait bertanggung-jawab menetapkan petunjuk dan standar teknis dan melakukan pembinaan dan pengendalian yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya secara terpadu.
5. Biro Pusat Statistik bertugas dan bertanggungjawab atas pengumpulan data hasil pengembangan pedesaan secara nasional dan pengolahannya. Termasuk dalam data hasil pembangunan desa adalah data dasar desa, indicator pembangunan desa, dan indicator makro pembangunan desa.

**G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA  
PARIWISATA**

Pariwisata berbasis masyarakat atau berbasis Usaha Kecil pada umumnya pengembangan pariwisata yang berskala kecil, bersifat beragam, bernuansa keunikan lokal, yang dikelola oleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti ciri-ciri unik serta sejumlah karakter yang oleh Nasikin (2000: 26-27) dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, oleh karena karakternya yang lebih mudah diorganisasi di dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan: secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional yang berskala massif.

Kedua, pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek dan atraksi wisata berskala kecil, dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas dan pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

Ketiga, berkaitan erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya, lebih dari pariwisata konvesional yang bersifat massif pariwisata alternatif yang berbasis komunitas lokal untuk melibatkan diri di

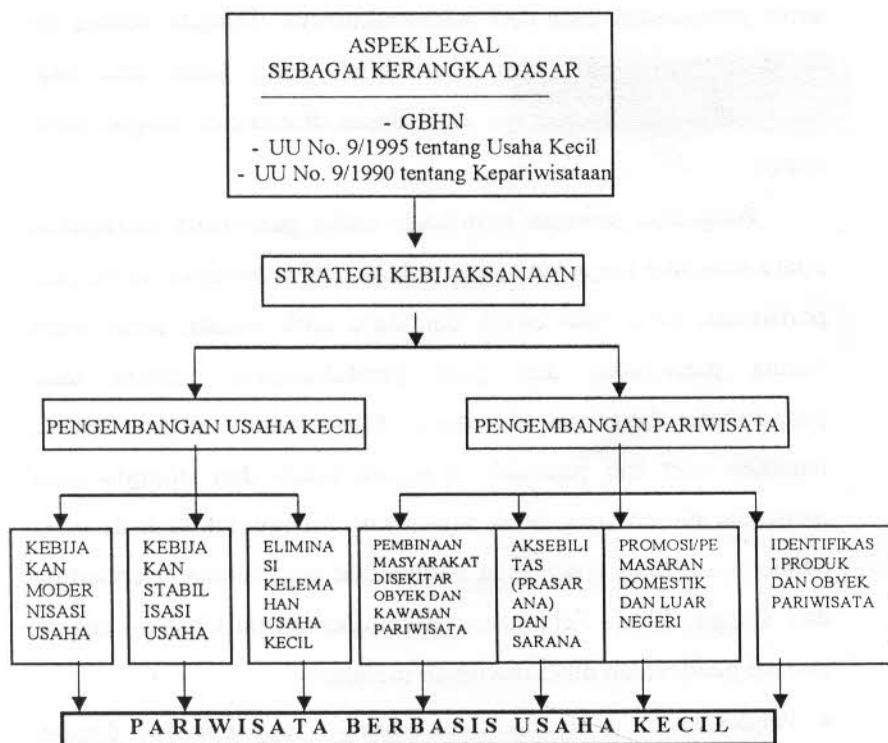
dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata. Oleh karena itu itu lebih memberdayakan masyarakat.

Keempat, pariwisata alternatif yang berbasis komunitas tidak hanya memberikan tekanan pada pentingnya “berkelanjutan kultural” tetapi secara aktif bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan lokal, antara lain melalui pendidikan dan pengembangan organisasi wisatawan.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat, memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat. Upaya ini memerlukan pembelajaran dan pembuktian bahwa masyarakat yang beragam dapat bekerjasama, menggali potensi dan menjawab persoalan pembangunan, yang tentu saja memerlukan kemitraan. Meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat tidak dengan sendirinya akan memberikan jaminan bahwa tuntutan akan pembangunan yang berkelanjutan dapat dipenuhi atau diwujudkan, di atas landasan etis dan politis. Keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pariwisata merupakan syarat yang paling esensial dari peluang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut ini adalah gambar pengembangan pariwisata berbasis Usaha Kecil.

**Gambar 4.1.**  
**Pengembangan Pariwisata Berbasis Usaha Kecil**



Pada tingkat yang paling mendasar, syarat paling esensial di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat adalah bahwa inisiasi dan penyelenggaranya tidak dipaksakan oleh alasan dan motif serta kepentingan yang datang dari luar. Sebaliknya, pembangunan yang terutama harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan masyarakat. Dan demikian semua itu terjadi masyarakat harus diberi

kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk pemilikan serta penguasaan aset dan infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Penguatan jaringan kemitraan usaha pariwisata merupakan upaya menjalin kerjasama antar pelaku usaha (meliputi usaha jasa pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata) dan para pendukungnya (antara lain: pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, lembaga riset dan pendidikan) secara setara dan sinergis guna mencapai tujuan yang tidak saja saling menguntungkan diantara pelaku kemitraan, tetapi juga bermanfaat bagi semua (Depbudpar dan Stuppa, 2001). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa tataran konsep pendekatan dikembangkan melalui:

- Pendekatan masyarakat (*community approach*) dengan menciptakan iklim kondusif bagi partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama.
- Optimalisasi potensi lokal (*local potensial sources*) menjadi suatu hasil yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat setempat.
- Nilai tambah (*value added*) ekonomis yang terus menerus dari adanya kegiatan kemitraan tersebut.

Secara praktis kemitraan usaha pariwisata perlu mengintegrasikan pengembangan produk dan pasar sekaligus dengan modus cerdas (*smart*) yang mampu meniti gelombang perubahan dan memanfaatkan jaringan masyarakat global. Hal ini dimungkinkan dengan kecenderungan masyarakat yang mengglobal didukung oleh teknologi telekomunikasi dan jaringan informasi serta peran media masa yang progresif.

Pada kenyataannya, pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata di Kecamatan, khususnya kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, hal ini tidak mendapat perhatian dan pembinaan khusus tentang potensi pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah waktunya bahwa dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata, khususnya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu segera difikirkan untuk dilakukan penggalian potensi dan pengembangan pariwisata berbasis Usaha Kecil.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mewujudkan daerah otonom, memerlukan peran aktif masyarakat setempat dalam setiap langkah pembangunan. Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mendayagunakan mekanisme perencanaan dari bawah, yaitu di tingkat desa melalui wadah kelompok masyarakat desa. Tantangan saat ini adalah mewujudkan ekonomi rakyat yang kokoh meskipun menghadapi krisis, sehingga kebijaksanaan yang perlu dikembangkan adalah kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi, memihak, dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi rakyat.
2. Kabupaten Bandung memiliki kekayaan yang sangat potensial di bidang pariwisata sehingga perlu untuk dikembangkan. Melimpahnya sumber kekayaan ini memberikan peluang untuk dieksplorasi secara maksimal, terutama untuk memberdayakan ekonomi rakyat, sehingga sektor ini akan memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Dalam kaitan inilah eksplorasi kekayaan seharusnya mampu menjadi penunjang bagi pembangunan ekonomi, khususnya di Objek dan Daerah

Tujuan Wisata, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di Kecamatan Lembang.

3. Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat ekternal maupun internal, dalam bidang sumber daya manusia, pembinaan, sarana dan prasarana, pendanaan, produksi dan pengolahan, pemasaran dan lainnya, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil, walaupun telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi hal tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil untuk dipatuhi oleh semua pihak.
4. Ujung tombak dari prioritas yang ada adalah **pembangunan ekonomi rakyat** yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan dapat menikmati hasil pembangunan sesuai dengan kerja dan sumbangnan yang diberikannya pada proses pembangunan yang telah berlangsung. Terbentuknya

ekonomi rakyat di pedesaan merupakan prakondisi dari terciptanya masyarakat pedesaan yang maju, mandiri, sejahtera dan adil.

5. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat belum optimal penanganannya, khususnya yang berkaitan dengan penggalian potensi dan pengembangan pariwisata berbasis Usaha Kecil sehingga perubahan dan peningkatannya juga mengalami kelambatan.

## B. SARAN

1. Berkaitan dengan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, maka diharapkan kuantitas dan kualitas pembina perlu ditingkatkan, yang salah satunya melalui pendidikan dan latihan, termasuk cara menyampaikan isi/materi, metode pembinaan agar pembinaan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
2. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Lembang secara kuantitatif dirasakan masih perlu terus ditingkatkan terutama dalam kegiatan usaha, sehingga pada gilirannya keberhasilan secara kuantitatif tersebut dapat didukung pula oleh kualitas, baik dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan,

pendanaan, sumber daya manusia maupun kegiatan usaha agar lebih berhasil.

3. Pengelolaan dan produk yang dihasilkan Usaha Kecil termasuk ketepatan dan kecepatan peralatan yang digunakan hendaknya dapat diupayakan untuk mencapai peningkatan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan dalam jumlah yang optimal.
4. Perlu dipikirkan upaya penggalian dan tambahan dana/modal untuk biaya operasional guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil, khususnya di Objek dan Daerah Tujuan Wisata, di Kecamatan Lembang sehingga dapat cepat tumbuh dan berkembang, serta dapat memberdayakan masyarakat secara optimal.
5. Kaitannya dengan memberdayakan masyarakat dalam menubuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, maka upaya nya perlu untuk dioptimalkan, khususnya upaya untuk menggali potensi dan mengembangkan pariwisata berbasis Usaha Kecil, sehingga pertumbuhan dan peningkatan Usaha Kecil di Objek dan Daerah Tujuan Wisata khususnya juga akan mengalami percepatan.
6. Memperhatikan kenyataan yang ada, maka pemerintah daerah Kabupaten Bandung perlu menaruh perhatian yang

besar terhadap pengembangan usaha kerakyatan, dalam hal ini Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ini diharapkan dapat diarahkan pada pembentukan struktur peningkatan di berbagai aspek, yang satu sama lain saling ketergantungan, seperti: peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja serta diharapkan mampu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, maupun jasa.

7. Disamping meningkatkan sarana dan prasarana umum, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang diharapkan mampu memacu investasi swasta di wilayah pedesaan. Deregulasi dalam birokrasi pelayanan dan perizinan, memangkas berbagai pungutan, merupakan bentuk insentif yang dapat meningkatkan investasi swasta. Disamping itu, diperlukan bentuk insentif lain dari pemerintah (termasuk untuk menarik arus investasi ke pedesaan, misalnya dengan mekanisme keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu). Dimasa mendatang, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang diharapkan mampu lebih mengarahkan arus investasi tersebut ke wilayah pedesaan dan wilayah pertumbuhan

baru. Langkah seperti ini termasuk langkah “keberpihakan” yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito (1994), "Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat", makalah dalam *Seminar Nasional "mencari Keseimbangan Antara Konglomerat dan Pengusaha Kecil-Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Strategi* "Dies Natalis STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, 30 April.
- Anderson, Dennis (1982), "Small Industry in Developing Countries", *World Development*, November.
- Assauri, Sofjan (1993), " Interorganizational Process Dalam Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah", *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, No. 6, tahun XXII, Juni, h. 21-26.
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widjyobroto, Tridjoko Wismu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), *Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil*, LPPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
- Dicken, Peter (1992), *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity*, edisi ke 2, Paul Chapman Publishing Ltd. London.
- Harianto, Farid (1996), "Study on Subcontracting in Indonesian Domestic Firms", dalam mari Pangestu (ed.), *Small-Scale Business Development and Competition Policy*, CSIS, Jakarta.

- Hidayat, Anas (1994), "Analisis perkembangan Industri Kecil Berdasarkan Penyusunan Indeks Produktivitas dan Tingkat Efisiensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi*, Vol.3, Juni, h. 36 – 51.
- Kuncoro, Mudrajad (1994), Peta Bisnis Aliansi Strategik", *Manajemen dan Usaha Indonesia*, November.
- \_\_\_\_\_ (1995), "Tantangan dan Peluang Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi Ekonomi", Makalah dalam *Diskusi Ekonomi Kerakyatan*, diselenggarakan oleh Harian Pikiran Rakyat, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 Agustus.
- \_\_\_\_\_ (1996), "Struktur dan Kinerja Ekonomi Indonesia Setelah 50 Tahun Merdeka: Adakah Peluang Usaha Kecil?", *Jurnal Ekonomi*, tahun II, Vol. 7, Januari.
- \_\_\_\_\_ (1996), "Diktum Kemitraan Usaha, Antara Myths and Realities", *Kedaulatan Rakyat*, 12 Juli.
- \_\_\_\_\_ (1997), Pengembangan Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil: Suatu Studi Kasus di Kalimantan Timur", *Analisis CSIS*, No. 1.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimanyu (1995), "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi", *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, No. 10/VI/1995.
- Kuncoro, Mudrajad, Bambang Kustiunto, Masykur Wiratmo, dan R. Agus Sartono (1996), *Laporan Akhir*

*Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil Tahun Anggaran 1995/1996 Propinsi DIY, Kerjasama Depkop & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.*

Kustituanto, Bambang Masykur Wiratmo, Mudrajad Kuncoro, dan R Agus Sartono (1995), *Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta*, kerjasama Depkop & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.

Porter, Michael E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, The Macmillan Press LTD. London and Basingstoke.

Purnomo (1994), *Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Dalam Repelita VI*, Kanwil Departemen Koperasi dan PPK Provinsi DIY, Yogyakarta.

Sedarmayanti (1999), *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_(2003), *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Sjaifudian, Hatifah, Dedi Haryadi, Maspiyati (1995), *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, AKTIGA, Bandung.

Simatupang, Pantjar, M.H. Togatorop, Rudi P. Situmpul, Tulus tambunan (eds.) (1994), *Prosiding Seminar Nasional Peranan Strategis Industri Kecil dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap II*, UKI-Press, Jakarta.

- Soetrisno, Loekman (1995), "Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan: Suatu Tinjauan Sosiologis", Makalah dalam *Diskusi Ekonomi Kerakyatan*, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 Agustus.
- Sumodiningrat, Gunawan (1994), " Tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil", *Jurnal Tahunan CIDES*, no. 1, h. 157 – 164.
- Suprijadi, Anwar (1995), "Pemanfaatan Dana BUMN Untuk Program Pusat Pengembangan Pengusaha Kecil oleh perguruan Tinggi", makalah dalam *Seminar Apresiasi dan Kritik Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 6 – 7 Juli.

## LAMPIRAN 1

### PANDUAN WAWANCARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN USAHA KECIL BIDANG PARIWISATA DI OBJEK DAN DAERAH TUJUAN WISATA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

---

Menurut Bapak/Ibu/Saudara:

1. Apakah kesediaan pembina, usaha kecil untuk pelaksanaan program pembinaan dapat memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dan pariwisata yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatannya?
2. Apakah jumlah pembina yang tersedia cukup dan aktif serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil dan menengah?
3. Apakah kondisi daerah pemukiman penduduk para pengusaha kecil dan menengah sesuai untuk melakukan kegiatan usaha?
4. Apakah materi dan obyek pemberdayaan pembinaan dapat diserap dan diterapkan sesuai dengan yang dibutuhkan kegiatan usaha yang dilakukannya?
5. Apakah biaya yang tersedia dalam pelaksanaan pembinaan dapat memberi hasil yang memadai dalam hal pengadaan materi maupun sarana dan prasarana sehingga pembinaan usaha kecil dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tujuan?
6. Dengan dilakukan pemberdayaan pembinaan, apakah pendapatan para pengusaha pengolahan hasil serta pedagang berskala kecil dapat meningkatkan kesejahteraan dilihat dari hasil produksi?

7. Apakah hasil produksi pariwisata yang dilakukan para pengusaha kecil mempunyai mutu (kualitas) dan pemasaran hasil dapat memenuhi permintaan konsumen lokal maupun di luar daerah produksi, serta harga dapat lebih menguntungkan?
8. Apakah selama program pemberdayaan, pembinaan yang dilaksanakan, disertai upaya untuk mengatasi hambatan sehingga program pembinaan/pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?

## LAMPIRAN 2

### PANDUAN WAWANCARA TERINCI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN USAHA KECIL BIDANG PARIWISATA DI OBJEK DAERAH TUJUAN WISATA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

#### Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada jawaban BS (Baik Sekali), B (Baik), C (Cukup), K (Kurang), KS (Kurang Sekali), yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar atau sesuai.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		BS	B	C	K	KS
I.	Pembina Usaha Kecil	<input type="checkbox"/>				
1	Jumlah pembina yang ada pada saat ini sudah mencukupi	<input type="checkbox"/>				
2	Pembina selalu aktif dalam melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil	<input type="checkbox"/>				
3	Kemampuan pembina dalam penyampaian materi cukup memadai	<input type="checkbox"/>				
4	Keterampilan teknis yang dimiliki pembina cukup memadai dalam melaksanakan pembinaan	<input type="checkbox"/>				
5	Pembina cukup mampu dalam memberikan contoh	<input type="checkbox"/>				
6	Daerah pemukiman penduduk cocok untuk digunakan dalam kegiatan usaha	<input type="checkbox"/>				
7	Daerah pemukiman penduduk cukup mendapat pembinaan kegiatan usaha	<input type="checkbox"/>				
8	Tempat yang tersedia selalu dimanfaatkan dalam kegiatan usaha	<input type="checkbox"/>				

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		BS	B	C	K	KS
<b>II.</b>	<b>Materi Pembinaan Usaha Kecil</b>					
9	Materi pembinaan yang disampaikan sesuai dengan perkembangan ilmu	<input type="checkbox"/>				
	Materi pembinaan berkaitan dengan faktor penghambat dan kualitas hasil	<input type="checkbox"/>				
<b>III.</b>	<b>Cara Pembinaan Usaha Kecil</b>					
	Pembinaan selalu dilakukan dengan cara penyuluhan pada kelompok kegiatan usaha yang sejenis di satu tempat	<input type="checkbox"/>				
	Dalam melaksanakan pembinaan, selalu menggunakan metode percontohan atau praktik lapangan	<input type="checkbox"/>				
	Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan buku pedoman kegiatan usaha	<input type="checkbox"/>				
	Pembiayaan untuk konsumsi disediakan	<input type="checkbox"/>				
	Dalam pelaksanaan pembinaan selalu menyediakan konsumsi	<input type="checkbox"/>				
	Dalam pelaksanaan pembinaan selalu menyediakan biaya pengganti atas waktu yang digunakan	<input type="checkbox"/>				
	Dalam pelaksanaan pembinaan selalu menyediakan alat bantu peraga	<input type="checkbox"/>				
<b>IV.</b>	<b>Pengolahan dan Produk</b>					
	Pengelolaan usaha kecil setelah pembinaan mengalami peningkatan	<input type="checkbox"/>				
	Manajemen usaha setelah pembinaan menunjukkan peningkatan	<input type="checkbox"/>				
	Produksi hasil yang dilakukan setelah pembinaan dapat mengalami peningkatan permintaan	<input type="checkbox"/>				

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		BS	B	C	K	KS
	Hasil produksi selalu dipasarkan keluar daerah produksi	<input type="checkbox"/>				
	Pemasaran hasil produksi yang dilakukan selalu mengutamakan kualitas hasil	<input type="checkbox"/>				
	Harga jual hasil produksi usaha kecil dapat menutup biaya produksi	<input type="checkbox"/>				
	Kemampuan teknik dan manajerial usaha mengalami peningkatan	<input type="checkbox"/>				
	Selalu terdapat peningkatan kemampuan mengembangkan atau memperluas lapangan usaha baru	<input type="checkbox"/>				
	Produktivitas usaha selalu mengalami peningkatan	<input type="checkbox"/>				
V.	Peralatan yang Dimiliki Usaha Kecil					
	Alat produksi yang digunakan dapat mempercepat proses hasil produksi	<input type="checkbox"/>				
	Alat produksi yang digunakan tepat dan berguna	<input type="checkbox"/>				
	Alat produksi yang digunakan dapat meningkatkan mutu (kualitas) hasil produksi dan menghemat biaya	<input type="checkbox"/>				
VI.	Dana/Modal Usaha Kecil					
	Dana/modal yang dimiliki usaha kecil dirasakan cukup	<input type="checkbox"/>				

Bandung, Juni 2003

### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR NAMA HOTEL, RESTORAN DAN FASILITAS WISATA LAINNYA DI KECAMATAN LEMBANG

1. Juvante Hotel dan Restoran. Jl Raya Lembang No 7 Bandung 2786221. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 500 m dari perbatasan. Kondisi Cukup baik.
2. Wisma dan Catering Kahuripan. Jl. Dr. Setia Budi No 27 Bandung 2786513. Lokasi sebelah kanan arah Lembang masuk 50 m, ± 450 dari No 1. Kondisi Cukup baik
3. Wisma Pondok Shinta. Jl. Raya Lembang No 16 Bandung. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 60 m dari No 2. Kondisi Cukup Baik
4. Pondok Dayang Sumbi Cottage & Restoran. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 760 dari No 3. Kondisi baik
5. Milk Bar F & B. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 110 m dari No 2. Kondisi baik
6. Pondok Permata. Jl. Raya Lembang No 23 Bandung 2786659. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 120 m dari No 5. Kondisi cukup baik
7. Penginapan Kori Indah. Jl. Raya Lembang No 31 Bandung 2789216. Lokasi sebelah kiri arah lembang ± 65 m dari No 6. Kondisi kurang baik
8. Warung Nasi Pengkolan. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 20 m dari No 7. Kondisi cukup baik
9. Penginapan 68. Jl. Raya Lembang No 68 Bandung 2787625. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 90 m dari No 8. Kondisi kurang baik
10. Pines Garden. Jl. Raya Lembang. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 240 m dari No 9. Kondisi cukup baik.
11. Garuda Art Shop, Jl. Raya Lembang. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 300 m dari No 10. Kondisi cukup baik.
12. Rumah Makan Sari Rasa (kawasan sate kelinci) Jl. Raya Lembang 2769601. Lokasi sebelah kiri dan kanan arah Lembang ± 100 m dari No 11. Kondisi cukup baik

13. Pondok Kahuripan Hotel. Jl. Raya Lembang 2786819. Lokasi sebelah kiri arah Lembang masuk 200 m, ± 75 m dari No 12. Kondisi baik
14. Monumen Pasir Pahlawan Dr. Otista. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 780 m dari No 13. Kondisi kurang baik
15. Batu Reok Art Shop. Jl. Raya Lembang 134 Bandung 2787092. lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 540 m dari No 13. Kondisi kurang baik
16. Rumah Makan Sari Mas Khas Sunda. Jl. Raya Lembang 161 Bandung. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 50 m dari No 14. Kondisi baik
17. Restoran Boscha masakan oriental Jl. Raya Lembang 160 Bandung 2786293. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 50 m dari No 14. Kondisi baik
18. Rumah Makan Panyileukan. Jl. Raya Lembang No 234 Bandung 2786787. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 70 m dari No 16. Kondisi cukup baik
19. Pasar Kembang Jl. Raya Lembang. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 270 m dari No 17. Kondisi kurang baik
20. Nasi Pulen Jl. Raya Lembang. Lokasi sebelah kiri arah Lembang ± 220 m dari No 18. Kondisi cukup baik
21. Sangria Resort dan Spa, Jl. Holtikutura Lembang, 2788777. Lokasi sebelah kiri arah Lembang masuk 50 m, berhadapan dengan Grand Lembang. Kondisi cukup baik.
22. Grand Hotel Lembang Jl. Raya Lembang. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 100 m dari No 19. Kondisi baik
23. Rumah Makan Marantina Khas Sunda. Jl. Raya Lembang 234 Bandung 2787129. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 30 m dari No 20. Kondisi cukup baik
24. Wisma Bumi Makmur Indah. Jl. Raya Lembang 124. Lokasi sebelah kanan arah Lembang ± 190 m dari No 21. Kondisi baik
25. Kawasan Kota Lembang (oleh-oleh dan Rumah Makan), Lokasi sebelah kiri dan kanan arah Lembang ± 50 m dari No 22. Kondisi cukup baik
  - Oleh-oleh Bandung Sari Raos Jl. Raya Lembang 240 Bandung 2786990

- Ayam goreng dan bakar Brebes Jl. Raya Lembang 342 Bandung 2787541
  - Ayam goreng Laksana Jl. Raya Lembang 322 Bandung 2787094
  - Ayam goreng Silih Asih Jl. Raya Lembang 326 Bandung 2786875
  - Rumah Makan Lembang Chinese Food Jl. Raya Lembang 233 Bdg 2786087
  - Rumah Makan Jaya
  - Warung Nasi Ampera Jl. Raya Lembang 270 Bandung 2786003
26. Hotel Lingga Jaya Giri, Jl. Jaya Giri. Lokasi sebelah kanan arah Jaya Giri  $\pm$  200 m dari Jl. Raya Lembang. Kondisi cukup baik.
27. Bumi Perkemahan Jaya Giri, Jl jaya Giri. Lokasi sebelah kiri arah Jaya Giri  $\pm$  5 km dari Jl. Lembang. Kondisi cukup baik.
28. Café Sumur Lembang Kencana Peternakan dan Restoran, Jl Raya Lembang No 301-303 Bandung 2786023. Lokasi sebelah kiri arah Lembang  $\pm$  100 m dari No. 27. Kondisi baik.
29. Pondok Panorama Melati 2. Jl. Tangkuban Perahu No 22 Bandung 2786190.Lokasi sebelah kanan arah TP,  $\pm$  100 m dari Simpang Maribaya. Kondisi Cukup baik
30. Wisma Nurma Gunung Putri. Jl. Raya Tangkuban Perahu No 24 Bandung 2786178. Lokasi bersebelahan dengan No 29. Kondisi Cukup Baik
31. Hotel Diamond, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  100 m dari No 30. Kondisi cukup baik. Villa de Rossa Hotel dan Restoran, Jl. Panorama I No 34-36 Tangkuban Perahu. Lokasi sama dengan Hotel Diamond. Kondisi cukup baik.
32. Rumah Makan Tanjung sari Masakan Nusantara, Jl. Raya Tangkuban Perahu No 29 B Bandung 2789936. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  25 m dari No 31. Kondisi cuup baik.

33. Panorama Lembang Hotel dan Restoran, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  10 m dari No 32. Kondisi baik
34. Ikan Bakar Dulang Sari dan Kolam Pemancingan. Jl. Raya Tangkuban Perahu 2789131. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  175 m dari No 33. Kondisi cukup baik.
35. Kolam Pancing Lembah Mas, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  100 m dari No 34. Kondisi cukup baik
36. Kolam Pemancingan Hurip Mandiri, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  50 m dari No 35. Kondisi cukup baik
37. Hotel Nur Alam, Jl. Raya Tangkuban Perahu No 67 Bandung 2787584. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  10 m dari No 36. Kondisi cukup baik.
38. Sari Bumi Raya Hotel, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  120 m dari No 37. Kondisi cukup baik.
39. Golden Shower (madu asli), Jl. Raya Tangkuban Perahu No 85 Bandung 2786050. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  15 m dari No 38. Kondisi cukup baik
40. Putri Gunung Hotel \*\*\*\*. Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP, berhadapan dengan No 39. Kondisi baik
41. Saung Ranggon Rumah Makan Khas Sunda (rekreasi dan pemancingan), Jl. Raya Tangkuban Perahu No 100 Bandung 2786215. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  1100 m dari No 40. Kondisi baik
42. Food Centre Kabitta dan Padepokan Manggala Giri & Cottage. Jl. Raya Tangkuban Perahu 107 Bandung 2787505. lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  1,5 km dari No 41. Kondisi kurang baik
43. Pondok Surya. Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  700 m dari No 42. Kondisi buruk/tutup.
44. Villa Enggal, Jl. Raya Tangkuban Perahu Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  900 m dari No 43. Kondisi baik

45. Pemancingan Nyampai Peuntas. Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP masuk 500 m , $\pm$  1,1 km dari No 44. Kondisi cukup baik
46. Villa Melati Putih, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  210 m dari No 45. Kondisi cukup baik
47. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jl. Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  500 m dari No 46. Kondisi baik.
48. Agro Wisata Petermakan Sapi Perah. Jl Raya Tangkuban Perahu Cikole Bandung 2786132. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  250 m dari No 47. Kondisi Cukup baik.
49. Rumah Makan Bunga Tanjung Masakan Padang, Jl. Raya Lembang Cikole.Lokasi sebelah kanan arah TP,  $\pm$  600 m dari No 48. Kondisi kurang baik
50. Sindang Reret Hotel dan Restoran, Jl. Raya Lembang Cikole. Lokasi sebelah kiri arah TP  $\pm$  300 m dari No 49. Kondisi Baik
51. Bumi Perkemahan Cikole, Jl Raya Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kanan arah TP  $\pm$  2,3 km dari No 50. Kondisi cukup baik
52. Pintu Masuk II Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri berhadapan dengan No 51. Kondisi cukup baik
53. Pintu Masuk I Tangkuban Perahu. Lokasi sebelah kiri arah Subang (batas Kecamatan Lembang)  $\pm$  1,5 km dari No 52. Kondisi baik
54. Penginapan Buah Sinuan, Jl. Raya Grand Hotel No 34 Bandung 2786532. Lokasi sebelah kanan arah Bandung  $\pm$  500 m dari pasar Lembang. Kondisi cukup baik
55. Penginapan Cemara Asri, Jl Grand Hotel 2785755. Lokasi sebelah kiri arah Bandung  $\pm$  90 m dari No 54. Kondisi cukup baik
56. Astic Hotel dan Bungalow, Jl. Raya Grand Hotel No 35 Bandung 2786903. Lokasi sebelah kiri arah Bandung bersebelahan dengan No 55. Kondisi cukup baik.
57. Situ Umar Indah Taman Rekreasi dan Pemancingan, Jl. Raya Grand Hotel No 354 Bandung 2786770. Lokasi

- sebelah kiri arah Bandung masuk 50 m, ± 100 m dari No 56. Kondisi cukup baik.
- 58. Rumah Makan Manjabal. Lokasi bersebelahan dengan No 57. Kondisi cukup baik.
  - 59. Valentine Tea House & garden, Jl. Cijeruk No 33 Lembang. Lokasi sebelah kiri arah cijeruk ± 100 m dari Pasar Lembang. Kondisi cukup baik.
  - 60. R La Oma Ballroom, Resto & Gallery, Jl Cijeruk Lembang. Lokasi sebelah kanan arah Cijeruk ± 100 m dari No 59. Kondisi baik.
  - 61. Kedai Teteh Indorasa, Jl. Maribaya No 9 Lembang 2786923. Lokasi sebelah kiri arah Maribaya ± 25 m dari simpang Jl. Lembang. Kondisi cukup baik.
  - 62. Hotel Yehezkiel, Jl. Maribaya No 11 B Lembang 2787133. Lokasi sebelah kiri masuk 100 m, ± 8 m dari 61. Kondisi cukup baik.
  - 63. Pondok Lembang, Jl. Maribaya 19. Lokasi sebelah kiri arah Maribaya ± 400 m dari No 62. Kondisi cukup baik.
  - 64. Rumah bunga, Jl. Maribaya. Lokasi sebelah kanan arah Maribaya ± 1,2 km dari No 63. Kondisi cukup baik.
  - 65. Pondok Pesona Lembang, Jl. Raya Maribaya 155 bandung 2788827. Lokasi sebelah kiri arah Maribaya ± 600 m dari No 64. Kondisi cukup baik.
  - 66. Penginapan dan Restoran Pondok Sukamanah, Jl. Maribaya 163 Bandung 2786996. Lokasi sebelah kiri arah maribaya, ± 300 m dari No 65. Kondisi cukup baik.
  - 67. Objek Wisata Maribaya ( curug Omas, Cikawali, Cigulang dan pemandian air panas), Jl. Raya Maribaya. Lokasi sebelah kanan arah maribaya, ± 600 m dari No 66. Kondisi cukup baik.
  - 68. Pondok Bella Vista, Jl. Kol. Masturi No.3 Bandung 2789194. Lokasi sebelah kiri arah Parongpong, ± 25 m dari simpang Lembang. Kondisi cukup baik.
  - 69. Bonita Pemancingan, Jl. Kol. Masturi. Lokasi sebelah kanan arah Parongpong ± 1,5 km dari no 68. Kondisi cukup baik.
  - 70. Rumah Makan Alam Sejuk (wisata alam, pemancingan, perkebunan, berkuda,dan penginapan), Jl. Kol. Masturi

2787782. Lokasi sebelah kanan arah Parongpong ± 20 m dari no 69. Kondisi cukup baik.
71. Padepokan Karangtumaritis, Jl. Kol. Masturi. Lokasi sebelah kiri arah Parongpong ± 1,5 km dari No 70. Kondisi cukup baik.
72. Sapulidi (Komplek Graha Puspa), Jl. Kol. Masturi 2786915. Lokasi sebelah kiri arah Parongpong ± 1 km dari no 71. Kondisi cukup baik.
73. Vipasana Graha (Vihara), Jl. Kol. Masturi no 69. Lokasi sebelah kiri arah Parongpong ± 5 m dari no 72. Kondisi cukup baik.
74. Lembang asri Mountain Resort Hotel, Jl. Kol. Masturi 2787690. Lokasi sebelah kanan arah Parongpong masuk 900 m, 4 km dari Jl. Lembang. Kondisi cukup baik.





ISBN 979-97104-7-2



9 789799 710475 >